

RENCANA AKSI TAHUNAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024



**BAPPEDA KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ini bisa diselesaikan sesuai rencana. Pemerintah Kota Lhokseumawe telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi kemiskinan beserta dampak yang ditimbulkannya. Selain tetap konsisten menjalankan program penanggulangan yang sudah ada (reguler), Pemerintah Kota Lhokseumawe juga menjalankan program pengaman sosial dalam upaya membantu meringankan beban masyarakat miskin, rentan serta masyarakat lainnya.

Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Tahun 2024 berisi penjelasan mengenai kondisi kemiskinan Kota Lhokseumawe, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe beserta target program dan anggarannya selama Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Sekretariat TKPK Kota Lhokseumawe serta kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang ada pada Perangkat Daerah Provinsi Kota Lhokseumawe.

Demikian, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan ini. Semoga bermanfaat sebagai bahan perencanaan dan penganggaran pembangunan ke depan bagi seluruh masyarakat Kota Lhokseumawe.

Lhokseumawe,

2024

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEP. MAHRUR, S.STP, M. Kesos
Jambina, IV/a
Nip. 19850516 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	7
2.1. Kondisi Umum Kota Lhokseumawe	7
2.2. Perkembangan Kondisi Kemiskinan Kota Lhokseumawe	8
2.1.1 Persentase Penduduk Miskin (P0)	8
2.1.2 Jumlah Penduduk Miskin	9
2.1.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	11
2.1.4 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).....	12
2.1.5 Garis Kemiskinan	12
2.3. Hasil Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Tahun Sebelumnya.....	14
2.3.1 Dimesi Ketenagakerjaan	14
2.3.2 Dimensi Kesehatan	16
2.3.3 Dimensi Pendidikan.....	25
2.3.4 Dimensi Infrastruktur.....	31

BAB III KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	53
3.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2024.....	53
3.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2024.....	58
BAB IV RENCANA AKSI TAHUNAN TAHUN 2024	61
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2024.....	61
4.2 Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024.....	76
BAB V PENUTUP.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.....	15
Tabel 2.2.	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022	16
Tabel 2.3.	Angka Kematian Bayi (AKB) (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022.....	18
Tabel 2.4.	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022	19
Tabel 2.5.	Prevalensi Balita Gizi Kurang Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022.....	20
Tabel 2.6.	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022.....	21
Tabel 2.7.	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2021	24
Tabel 2.8.	Jumlah anak usia sekolah, 7-12 Tahun(SD/MI), 13-15 Tahun (SMP/Mts) dan 16-18 Tahun (SMA/MA), yang bersekolah dan tidak bersekolah, menurut Kecamatan di Kota Lhokseumawe.....	27
Tabel 2.9.	Jumlah anak usia sekolah, 7-12 Tahun(SD/MI), 13-15 Tahun (SMP/Mts) dan 16-18 Tahun (SMA/MA), yang bersekolah dan tidak bersekolah, menurut Kecamatan di Kota Lhokseumawe.....	29
Tabel 2.10.	Jumlah anak usia sekolah, 7-12 Tahun(SD/MI), 13-15 Tahun (SMP/Mts) dan 16-18 Tahun (SMA/MA), yang bersekolah dan tidak bersekolah, menurut Kecamatan di Kota Lhokseumawe.....	31

Tabel 2.11. Rumah Tangga Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah di Kota Lhokseumawe Berdasarkan Kepemilikan Jamban....	33
Tabel 2.12. Jumlah Rumah Tangga di Kota Lhokseumawe Berdasarkan Sumber Air Minum Yang Dapat Dikonsumsi Berdasarkan Kecamatan	35
Tabel 2.13. Persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota, jenis kelamin KRT, dan sumber penerangan Provinsi Aceh Tahun 2022	36
Tabel 2.14. Jumlah Rumah Tangga Di Kota Lhokseumawe Berdasarkan Sumber Penerangan Yang Dimiliki Berdasarkan Kecamatan	36
Tabel 2.15. Hasil Evaluasi Anggaran Belanja Menurut Jenis Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023	37
Tabel 4.1. Program Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2024	64
Tabel 4.2. Matriks Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2024	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Lhokseumawe tahun 2015-2023	2
Gambar 2.1.	Peta Wilayah Kota Lhokseumawe	7
Gambar 2.2.	Presentase Penduduk Miskin (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2023	9
Gambar 2.3.	Jumlah Penduduk Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2023	10
Gambar 2.4.	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2023	11
Gambar 2.5.	Gambar 2.5 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Tahun 2014-2023.....	11
Gambar 2.6.	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Tahun 2014-2023.....	12
Gambar 2.7.	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2023	14
Gambar 2.8.	Penduduk Dengan Pengobatan Sendiri (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022	22
Gambar 2.9.	Angka Mordibitas (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022	23
Gambar 2.10.	Analisis Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Tahun 2018-2022.....	25
Gambar 2.11.	Analisis Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Tahun 2018-2022...	27
Gambar 2.12.	Analisis Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Tahun 2018-2022...	29

Gambar 2.13. Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Tahun 2017-2020.....	32
Gambar 2.14. Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2020	34
Gambar 2.15. Hasil Evaluasi Anggaran Belanja Menurut Jenis Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023	37
Gambar 2.14. Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2020	34
Gambar 4.1. Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Kota Lhokseumawe	63

BAB I

PENDAHULUAN

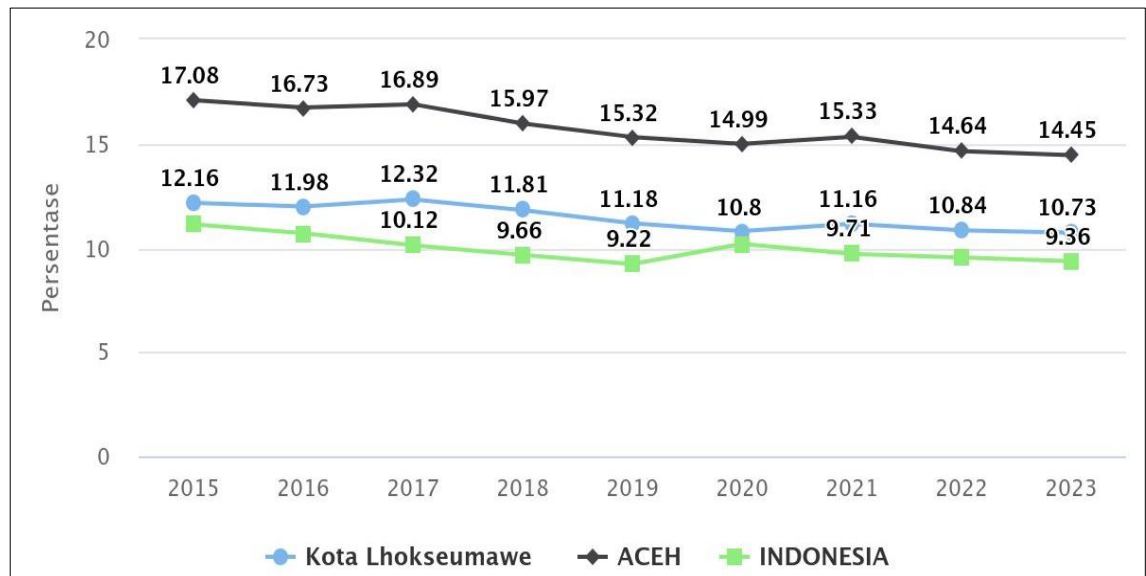
1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang dari tahun ke tahun menjadi isu global, nasional bahkan lokal sehingga perlu perhatian banyak pihak dan menjadi prioritas pembangunan. Permasalahan kemiskinan ditempatkan dalam kerangka multidimensi, yakni melihat kemiskinan dari berbagai dimensi dan memandang penyebab kemiskinan dari berbagai sisi.

Kemiskinan tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan keberdayaan dalam memenuhi hak-hak dasar, antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih dan lainnya. Secara nasional, kebijakan penurunan angka kemiskinan dapat dilihat dari agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter yang salah satunya melalui pengentasan kemiskinan.

Oleh karenanya masalah kemiskinan bersifat multidimensional sehingga memerlukan penanganan oleh semua pihak baik pemerintah, masyarakat dukungan dari swasta. Sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan, maka penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah dengan melakukan pendekatan strategi penanggulangan kemiskinan secara tepat, terpadu dan terkoordinasi dengan pelaksanaan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat dan negara.

Gambar 1.1 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Lhokseumawe tahun 2015-2023



Secara umum persentase penduduk miskin pada periode tahun 2015-2023 di Kota Lhokseumawe berada diatas nasional dengan pada persentase tahun 2017 berada pada angka 12,32 persen dibandingkan dengan nasional sebesar 10,12 persen, dengan kondisi pada tahun 2023 sebesar 10,73 persen dibandingkan dengan nasional sebesar 9,36 persen dan menempatkan Kota Lhokseumawe dengan persentase kemiskinan terendah ke-8 secara regional diwilayah Provinsi Aceh.

Dalam rangka mengupayakan agar penanggulangan kemiskinan terutama di Kota Lhokseumawe dapat lebih terarah, Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kota Lhokseumawe telah menyusun dokumen RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) tahun 2023-2026 yang didukung dengan dokumen RAT (Rencana Aksi Tahunan) untuk tahun 2024 untuk percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang “Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan TKPK

Kabupaten/Kota”. Dalam pelaksanaannya, TKPK Kota Lhokseumawe mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup Kota Lhokseumawe. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana diatas maka TKPK Kota Lhokseumawe perlu penyusunan Rencana Aksi Kota Lhokseumawe sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 yang selanjutnya disebut sebagai dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kota Lhokseumawe Bidang Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Dokumen RAT (Rencana Aksi Tahunan) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 36

Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen RAT Kota Lhokseumawe tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan satu tahun kedepan.
2. Sebagai salah satu referensi dalam penyusunan dokumen perencanaan penganggaran perangkat daerah berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
3. Memberikan arah untuk pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

Tujuan disusunnya Dokumen RAT Kota Lhokseumawe tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan permasalahan yang kompleks dan multidimensi sehingga perlu menyusun konsep antisipasi terhadap perubahan kebijakan penanggulangan kemiskinan baik nasional maupun di daerah.
2. Mengevaluasi hasil capaian kinerja pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun sebelumnya per bidang/urusan.
3. Menyusun kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan tahun berjalan per bidang/urusan serta target keberhasilan indikator penanggulangan kemiskinan beserta lokasi prioritas program.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Lhokseumawe ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA
AKSI TAHUNAN TAHUN SEBELUMNYA

BAB III : KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN BERJALAN

BAB IV : RENCANA AKSI TAHUNAN TAHUN 2024

BAB V : PENUTUP

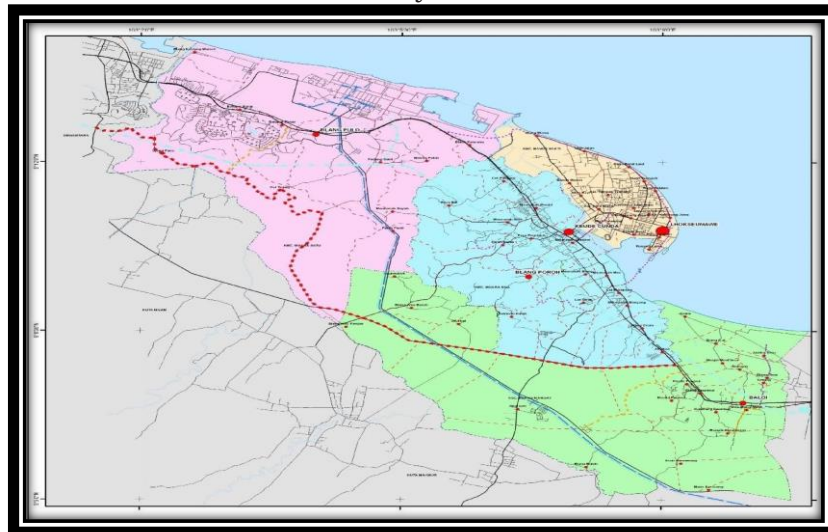
BAB II

HASIL EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUNAN TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Umum Kota Lhokseumawe

Letak geografis Kota Lhokseumawe yaitu 04°54'–05°18' Lintang utara dan 96°20' –97°21' Bujur Timur. Kota Lhokseumawe berada pada ketinggian +24 meter diatas permukaan laut, disebelah utara dan daerah disebelah timur berada pada ketinggian antara 105 diatas permukaan laut, sedangkan pada daerah di sebelah Selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 diatas permukaan laut.

Gambar 2.1. Peta Wilayah Kota Lhokseumawe



Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032

Kota Lhokseumawe dengan luas wilayah 181,06 Km² atau 18.106 Ha dibagi menjadi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan luas wilayah 56,12 Km², Kecamatan Muara Dua luas wilayah 57,80 Km², Kecamatan Muara Satu luas wilayah 55,90 Km² dan Kecamatan Banda Sakti luas wilayah 11,24 Km². Kota Lhokseumawe memiliki 9 kemukiman dengan 68 gampong.

Berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kota Lhokseumawe Periode 2012–2032, Kota Lhokseumawe berbatasan dengan wilayah berikut:

- Utara dengan Selat Malaka;
- Selatan dengan Kecamatan Kuta Makmur (Kabupaten Aceh Utara);
- Barat dengan Kabupaten Kecamatan Dewantara (Kab. Aceh Utara); dan
- Timur dengan Kecamatan Syamtalira Bayu (Kabupaten Aceh Utara).

2.2. Perkembangan Kondisi Kemiskinan Kota Lhokseumawe

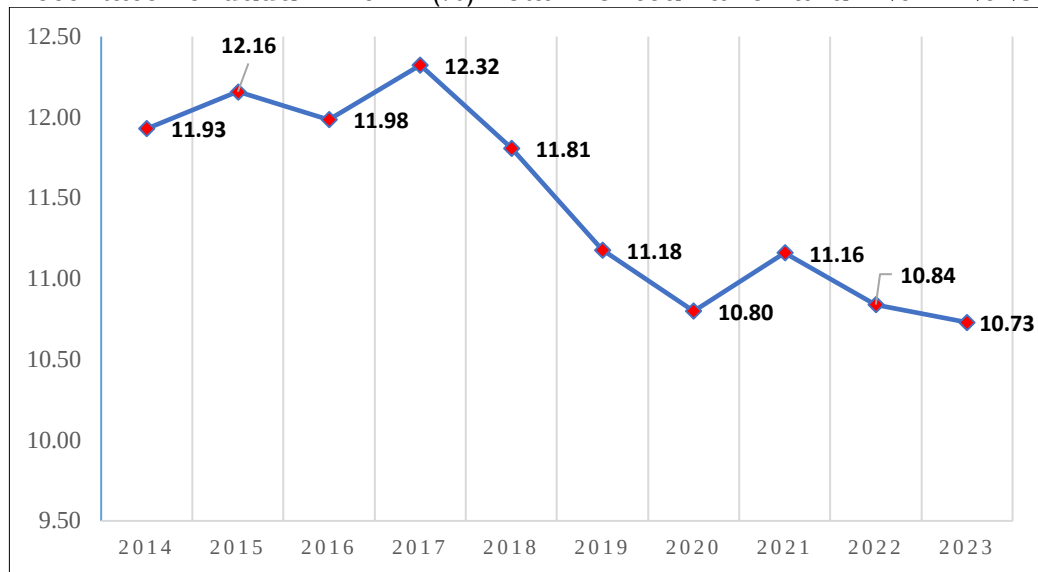
2.2.1. Presentase Penduduk Miskin (PO)

Tingkat Kemiskinan adalah indikator yang digunakan untuk memotret besaran porsi penduduk miskin pada suatu wilayah. Persentase penduduk miskin menurut BPS dan Permendagri 86 tahun 2017, yang menjelaskan formulasi dan pengukuran indikator kinerja daerah, merupakan persentase perbandingan antara jumlah orang miskin dengan jumlah penduduk pada suatu daerah dan waktu tertentu.

Kota Lhokseumawe dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 presentase penduduk mengalami perubahan yang fluktuatif yang tidak terlalu signifikan. Dari tahun 2017 sampai tahun 2020 presentase penduduk miskin kota Lhokseumawe terus mengalami penurunan yaitu dari 12,32% turun menjadi 10,80%. Pada Tahun 2021 presentase kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 11,16% yang disebabkan oleh wabah covid-19. Proporsi penduduk miskin Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 adalah 10,73 %. Namun demikian secara keseluruhan presentase penduduk miskin Kota Lhokseumawe selama lima tahun terakhir membentuk tren linier yang menurun, sehingga kondisi yang ada

saat ini dapat dijadikan basis untuk meneruskan penurunan kemiskinan pada tahun-tahun mendatang. Dengan catatan bahwa Kota Lhokseumawe dapat mempertahankan kecepatan penurunan persentase penduduk miskin dalam beberapa waktu terakhir.

Gambar 2.2
Presentase Penduduk Miskin (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2023



Sumber : BPS

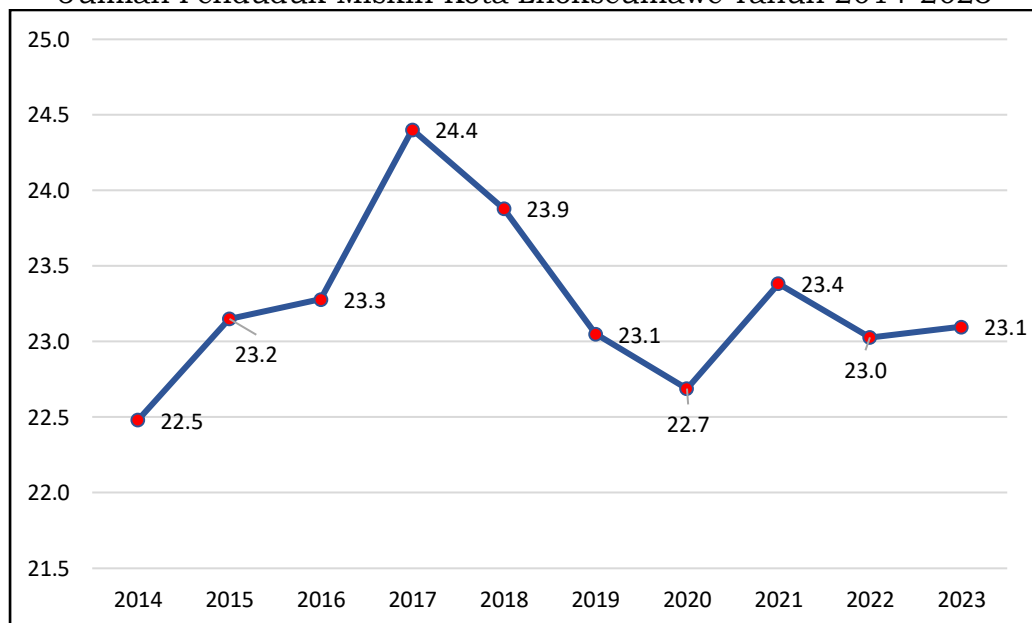
2.2.2. Jumlah Penduduk Miskin

Berdasarkan konsep kemiskinan sebelumnya, maka jumlah penduduk miskin adalah banyaknya penduduk (orang) pada suatu daerah dan waktu tertentu yang kondisi taraf hidupnya dianggap lebih rendah dari standar kemiskinan yang dikenal sebagai garis kemiskinan. Sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan, perkembangan jumlah penduduk miskin Kota Lhokseumawe mengalami penurunan.

Secara umum, perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Lhokseumawe memiliki tren yang menurun. Selama periode tahun 2017 sampai 2020, jumlah penduduk miskin di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan 1,7 ribu jiwa, kondisi

tersebut kemudian mengalami kenaikan pasca Covid 19 di tahun 2021 sebanyak 700 jiwa. Sementara pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin tersebut turun menjadi 23 ribu jiwa dan pada tahun 2023 Jumlah penduduk miskin kota Lhokseumawe adalah 23,1 ribu jiwa, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022, capaian terbaik yaitu pada tahun 2014 yaitu sebesar 22,5 ribu jiwa dalam 10 tahun terakhir.

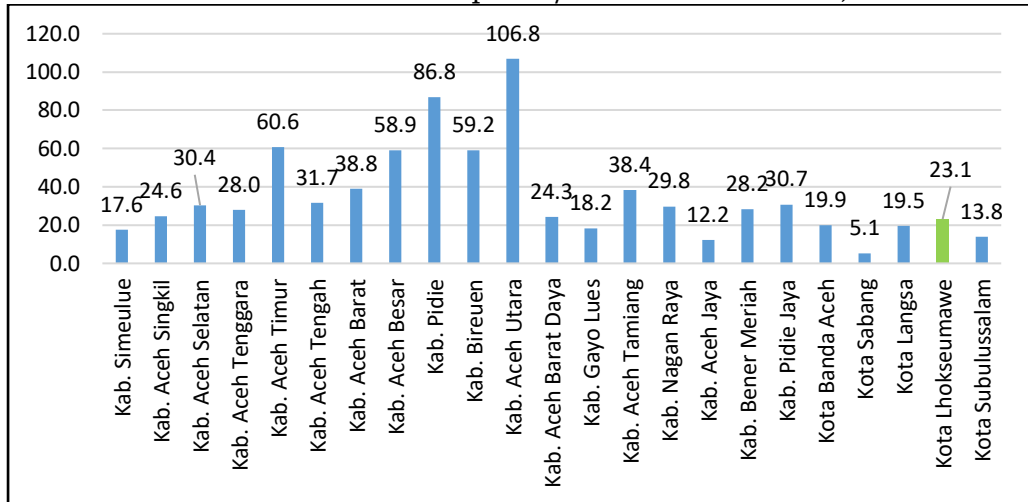
Gambar 2.3
Jumlah Penduduk Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2023



Sumber : BPS

Berdasarkan grafik dibawah, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2023, Kota Lhokseumawe berada pada urutan ke delapan terkecil di Provinsi Aceh.

Gambar 2.4
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Aceh, Tahun 2023

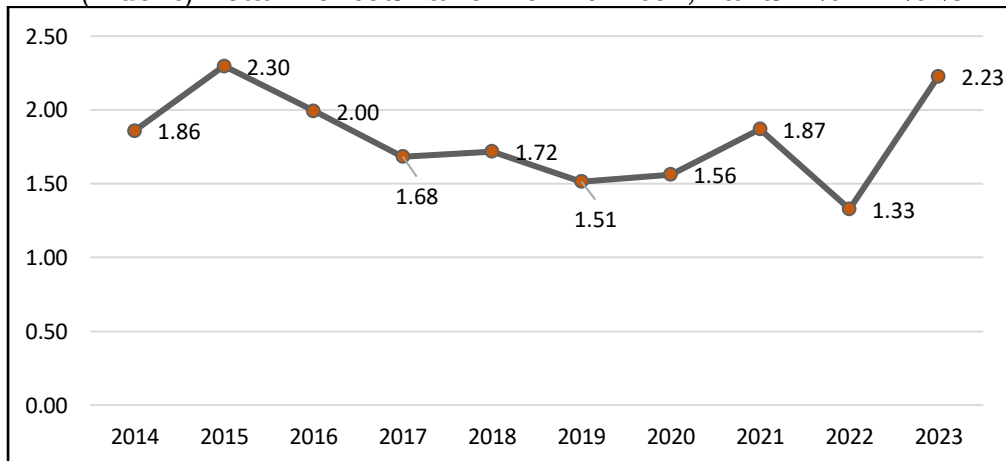


Sumber : BPS

2.2.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks kedalaman kemiskinan Kota Lhokseumawe mengalami fluktuatif. Dimana pada 2022 mengalami penurunan mencapai 1,33 dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2.23.

Gambar 2.5 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
(Indeks) Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Tahun 2014-2023

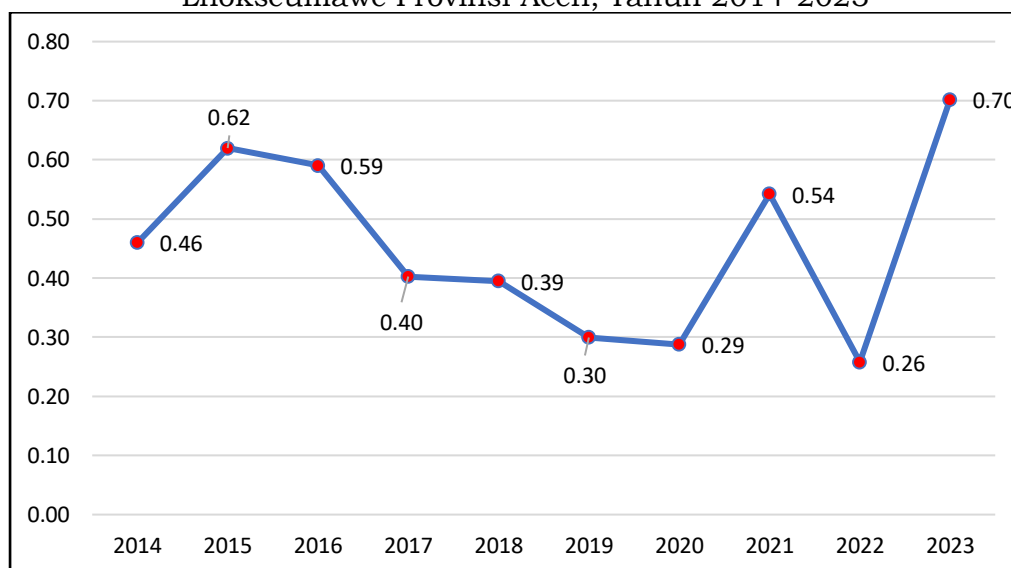


Sumber : BPS

2.2.4. Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Sejalan dengan Indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan di Kota Lhokseumawe dalam sepuluh tahun terakhir juga berfluktuatif dari tahun 2014-2023. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indeks yang naik turun dari tahun 2014-2023, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 0,26. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,70.

Gambar 2.6 Perkembangan Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2) Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Tahun 2014-2023



Sumber : BPS

2.2.5. Garis Kemiskinan

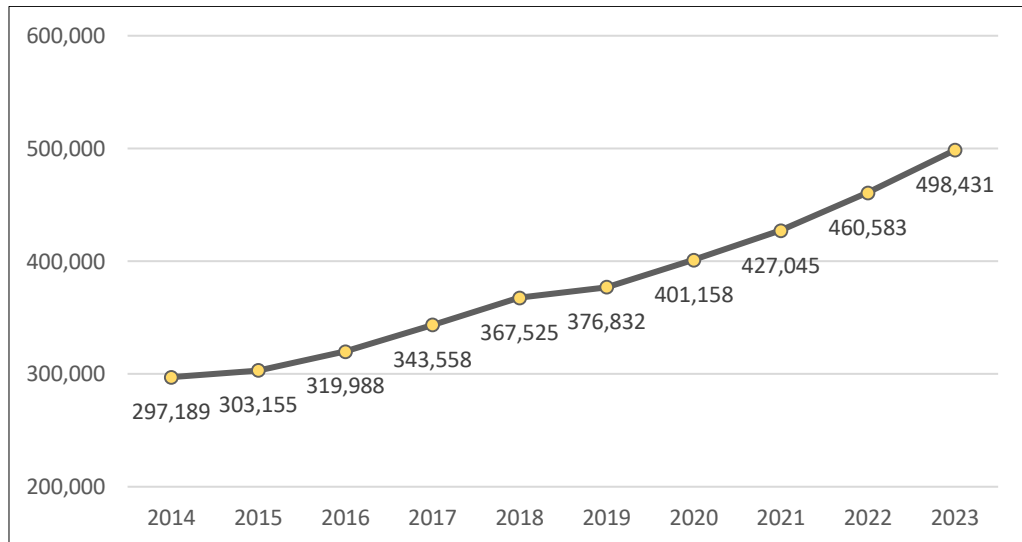
Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran

minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Sedangkan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Perhitungan GK dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Berdasarkan garis kemiskinan ini kemudian akan diukur berapa banyak penduduk yang memiliki pengeluaran dibawah standar nilai tersebut. Perbandingan dalam persentase antara jumlah penduduk yang pengeluarannya berada dibawah GK terhadap jumlah keseluruhan penduduk disebut sebagai Tingkat Kemiskinan. Oleh karenanya, permasalahan kemiskinan harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah baik dipusat, maupun bagi pemerintah daerah. Berbagai kebijakan dan program disusun dalam upaya mendorong sebanyak mungkin masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan dan kerentanan kemiskinan.

Garis kemiskinan (GK) Kota Lhokseumawe merupakan salah satu daerah dengan garis kemiskinan terendah di Provinsi Aceh. Pada Tahun 2023, Garis kemiskinan Kota Lhokseumawe adalah Rp. 498.431, jumlah rupiah ini terus meningkat dari tahun ke tahun sampai 2023. Pada Tahun 2014, garis kemiskinan Kota Lhokseumawe sebesar Rp. 297.189 terus meningkat sehingga tahun 2023 garis kemiskinan sebesar Rp. 498.431. Kondisi ini membutuhkan perhatian khusus Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam upaya menjaga agar laju inflasi harus benar-benar dalam kendali Pemerintah Kota Lhokseumawe dan perlu memastikan agar harga komoditi-komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat miskin khususnya harus murah, terjangkau dan tersedia.

Gambar 2.7 Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2014-2023



Sumber : BPS

2.3. Hasil Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Tahun Sebelumnya

2.3.1. Dimensi Ketenagakerjaan

Pengangguran dan kemiskinan merupakan permasalahan pokok makroekonomi. Peningkatan pengangguran akan menyebabkan pendapatan turun dan tingkat produktivitas juga akan rendah, ini juga berarti investasi juga akan rendah yang selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengangguran rendah menjadi peran kunci dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga menekan angka kemiskinan di wilayah Kota Lhokseumawe sehingga keluar dari garis kemiskinan.

Kota Lhokseumawe terdiri atas empat kecamatan dan 68 gampong. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe, selama periode 2017 s.d 2023 persentase penduduk miskin di Kota Lhokseumawe mengalami fase naik turun atau fluktuasi meskipun tidak terlalu ekstrim.

Tabel 2.1. Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10,51	12,52	11,06	11,99	11,16	9,15	8,78
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	62,60	57,48	61,94	63,17	63,91	64,11	64,36

Sumber: BPS

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa persentase tingkat pengangguran terbuka Kota Lhokseumawe pada Tahun 2017 mencapai 10,51 persen Pada Tahun 2018 terjadi kenaikan mencapai 12,52 persen dan terjadi penurunan namun tidak terlalu signifikan hanya berkisar sebesar 11,06 persen pada Tahun 2019. Pada Tahun 2020 mengalami kenaikan 0,93 persen hingga mencapai 11,99 persen sedangkan dari tahun 2021 sampai tahun 2023 terus mengalami penurunan menjadi 8,78 persen Pada tahun 2023.

Besarnya partisipasi angkatan kerja dalam pasar kerja dapat diukur dengan menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya pasokan tenaga kerja yang tersedia.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2017 sebesar 62,60 persen, menurun menjadi 57,48 persen di tahun 2018, namun selanjutnya menunjukkan trend yang terus naik menjadi 61,94 persen di tahun 2019, mengalami kenaikan kembali menjadi 63,17 persen pada tahun 2020 dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2023 sebesar 64,36 persen. Dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), maka dapat mempengaruhi terhadap jumlah tingkat pengangguran.

2.3.2. Dimensi Kesehatan

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas setiap manusia. Dalam Undang-undang No.36 Tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

2.3.2.1 Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe tahun 2018-2022.

Tabel 2.2. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022

Tahun	Kecamatan	Jumlah kematian ibu hamil	Jumlah kelahiran hidup per tahun	AKI	AKHB	%
2018	Banda Sakti	0	1941	0	1	0
	Muara Dua	0	1129			
	Muara Satu	0	679			
	Blang Mangat	0	432			
	Total	0	4181			
2019	Banda Sakti	1	1958	47,44	-46,44	0,04
	Muara Dua	1	1144			
	Muara Satu	0	624			
	Blang Mangat	0	489			
	Total	2	4215			
2020	Banda Sakti	3	1945	161,29	-160,29	0,16
	Muara Dua	2	1135			
	Muara Satu	1	792			

	Blang Mangat	1	468			
	Total	7	4340			
2021	Banda Sakti	4	1741	340	13	0
	Muara Dua	6	689			
	Muara Satu	1	841			
	Blang Mangat	1	257			
	Total	12	3528			
2022	Banda Sakti	1	1786	77,88	-76,88	
	Muara Dua	1	916			
	Muara Satu	0	669			
	Blang Mangat	1	481			
	Total	3	3852			

Sumber : Dinkes Kota Lhokseumawe, 2022

Berdasarkan data di atas, jumlah kasus kematian ibu Kota Lhokseumawe tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 12 kasus dari 3528 jumlah kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2022 jumlah kematian menurun drastis dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 3 kasus dari 3852 jumlah kelahiran hidup, jumlah kasus terendah atau tidak terjadi kematian ibu yaitu berada di Kecamatan Muara Satu dengan 669 jumlah kelahiran hidup.

2.3.2.2 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka Kematian Bayi (AKB) ini juga berdasarkan data yang diterima Dinkes Kota Lhokseumawe. Berdasarkan data tahun 2022, jumlah kasus kematian bayi Kota Lhokseumawe adalah 23 kasus dengan lahir hidup berjumlah 3852 jika disetarakan dengan AKB menjadi 3,33 per 1000 KH, jumlah kasus tertinggi terjadi di kecamatan Banda Sakti yaitu sebanyak 9 kasus dengan lahir hidup berjumlah 1786.

Pada Tahun 2022 Jumlah kasus kematian bayi relatif masih tinggi dibandingkan dengan 5 tahun terakhir. Jumlah kasus

kematian bayi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 1 kasus kematian bayi dari 4340 jumlah kelahiran hidup.

Tabel 2.3.
Angka Kematian Bayi (AKB) (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022

Tahun	Kecamatan	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun	Jumlah kelahiran hidup per tahun	AKB
2018	Banda Sakti	8	1941	3,33
	Muara Dua	3	1129	
	Muara Satu	2	697	
	Blang Mangat	1	432	
	Total	14	4199	
2019	Banda Sakti	7	1958	4,74
	Muara Dua	5	1144	
	Muara Satu	5	624	
	Blang Mangat	3	489	
	Total	20	4215	
2020	Banda Sakti	1	1945	0,23
	Muara Dua	0	1135	
	Muara Satu	0	792	
	Blang Mangat	0	468	
	Total	1	4340	
2021	Banda Sakti	3	1741	0,1896
	Muara Dua	6	689	
	Muara Satu	3	841	
	Blang Mangat	4	275	
	Total	16	3546	
2022	Banda Sakti	9	1786	5,97
	Muara Dua	4	916	
	Muara Satu	6	669	
	Blang Mangat	4	481	
	Total	23	3852	

Sumber : Dinkes Kota Lhokseumawe, 2022

2.3.2.3 Angka Kematian Balita (AKBA)

Angka kematian Balita adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).

Angka ini merefleksikan tinggi rendahnya angka kematian bayi dan angka kematian anak. Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan

kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

Tabel 2.4. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022

Tahun	Kecamatan	Jumlah kematian BALITA usia 5 tahun	Jumlah kelahiran hidup per tahun	AKBA	AKHB
2018	Banda Sakti	8	1941	4,27	-3,27
	Muara Dua	4	1129		
	Muara Satu	2	679		
	Blang Mangat	4	432		
	Total	18	14.594		
2019	Banda Sakti	7	1958	4,3	-3,3
	Muara Dua	6	1144		
	Muara Satu	5	624		
	Blang Mangat	3	489		
	Total	21	4215		
2020	Banda Sakti	1	1945	0,92	0,08
	Muara Dua	2	1135		
	Muara Satu	1	792		
	Blang Mangat	0	468		
	Total	4	4340		
2021	Banda Sakti		1741		
	Muara Dua		689		
	Muara Satu		841		
	Blang Mangat		257		
	Total		3528		
2022	Banda Sakti	1	1786	0,52	0,48
	Muara Dua	0	916		
	Muara Satu	1	669		
	Blang Mangat	0	481		
	Total	2	3852		

Sumber : Dinkes Kota Lhokseumawe, 2022

Dari tahun 2018-2022 angka kematian Balita terus mengalami perubahan yang fluktuatif. Berdasarkan data di atas, jumlah kasus kematian Balita Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 yaitu sebanyak 2 kasus dari 3852 jumlah kelahiran hidup,

jumlah kasus terendah atau tidak terjadi kematian Balita yaitu berada di kecamatan Muara Dua dan Blgn Mangat. Jumlah kasus kematian Balita pada tahun 2022 relatif kecil dibandingkan dengan 5 tahun terakhir.

2.3.2.4 Prevalensi Balita Gizi Kurang

Balita adalah anak yang berumur 0-59 bulan, pada masa ini ditandai dengan proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan disertai dengan perubahan yang memerlukan zat-zat gizi yang jumlahnya lebih banyak dengan kualitas yang tinggi. Akan tetapi, balita termasuk kelompok yang rawan gizi serta mudah menderita kelainan gizi karena kekurangan makanan yang dibutuhkan. Pada anak-anak, kurang gizi bisa menyebabkan mereka mengalami gangguan tumbuh kembang, berkurangnya tingkat kecerdasan dan prestasi akademik, berat badan kurang, serta *stunting*.

Tabel 2.5.
Prevalensi Balita Gizi Kurang Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Banyaknya Balita gizi kurang	108	113	196	208	807
2	Jumlah Balita	16210	15126	21626	20231	19948
	Persentase	0,67	0,75	0,91	1	4,05

Sumber : Dinkes Kota Lhokseumawe, 2022

Dari tahun 2018-2022 Balita kurang gizi terus meningkat jumlahnya. Berdasarkan data di atas, banyaknya balita kurang gizi Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 yaitu sebanyak 807 anak dari 19948 jumlah balita di Kota Lhokseumawe dengan presentase sebesar 4,05%. Pada tahun 2022 menjadi angka terbanyak dalam 5 tahun terakhir banyaknya balita kurang gizi.

2.3.2.5 Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita. Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan/ pilihan. Kegiatan utama, mencakup kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, pencegahan dan penanggulangan diare. Rasio posyandu di Kota Lhokseumawe dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2022 rasio posyandu sebesar 5 dengan perbandingan jumlah posyandu 101 Posyandu dari 19.948 jumlah balita.

Tabel 2.6.

Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022

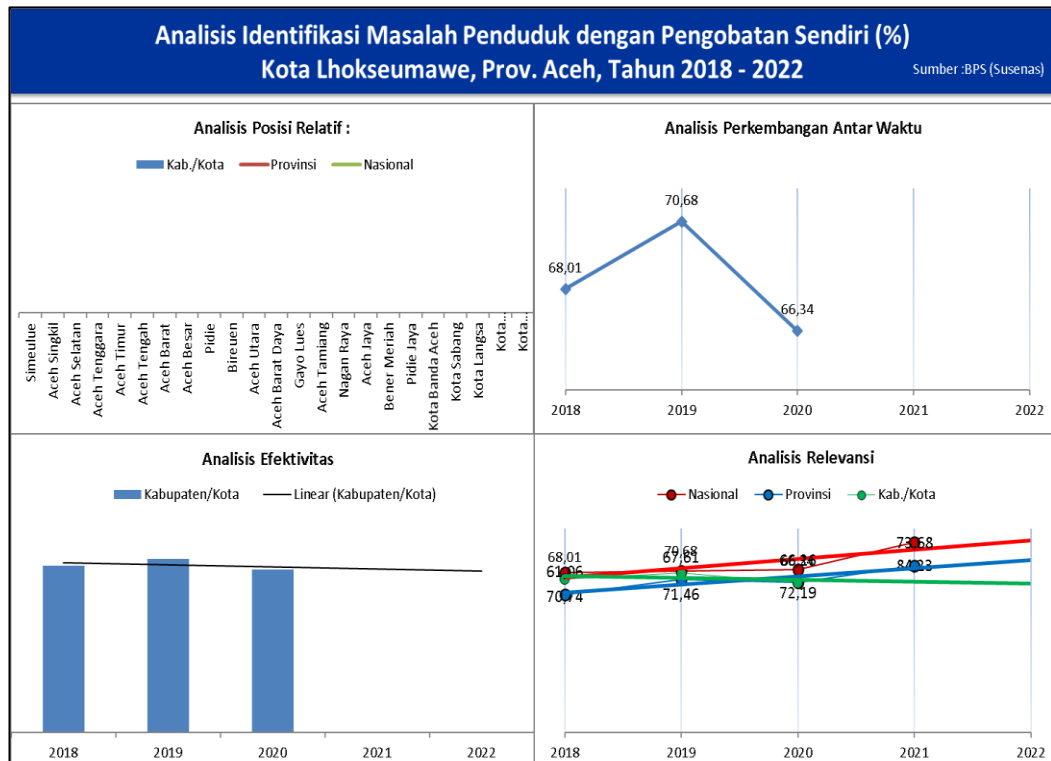
No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Posyandu	101	101	101	101	101
2	Jumlah Balita	16210	15126	21626	20231	19948
Rasio		6,23	6,67	4,67	0,235416667	5

Sumber: Dinkes Kota Lhokseumawe, 2022

2.3.2.6 Proporsi Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%)

Penduduk dengan pengobatan sendiri merupakan perbandingan antar penduduk yang sakit yang diobati sendiri dengan jumlah penduduk yang mengalami keluhan yang menyebabkan kegiatannya terganggu, indikator ini memberikan informasi tentang persentase penduduk yang sakit tidak menggunakan dalam pengobatannya.

Gambar 2.8 Penduduk Dengan Pengobatan Sendiri (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022

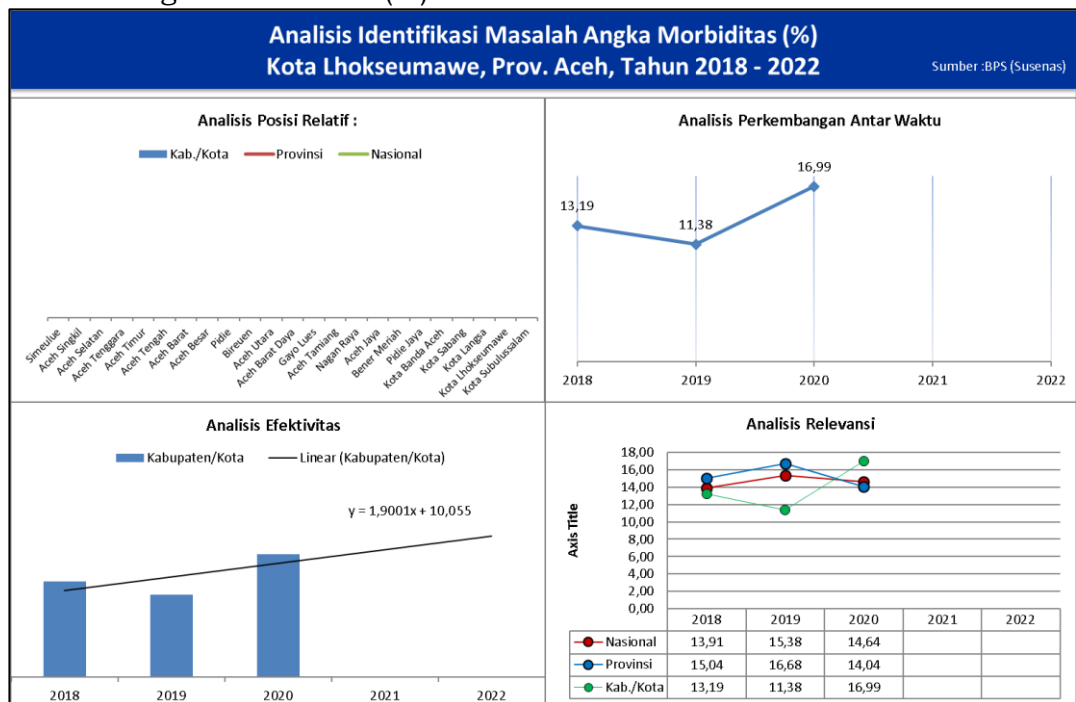


Sejak tahun 2018 – 2020, penduduk dengan pengobatan sendiri di Kota Lhokseumawe mengalami perubahan yang fluktuatif, pada tahun 2020 penduduk dengan pengobatan sendiri sebesar 66,34%. Ini membuktikan bahwa dalam kurun waktu tersebut, baik nasional, provinsi maupun Kota Lhokseumawe menunjukkan trend yang cenderung mengalami peningkatan persentase penduduk dengan pengobatan sendiri. Namun trend Kota Lhokseumawe lebih rendah dibandingkan nasional. Secara umum penduduk Kota Lhokseumawe melakukan upaya pengobatan sendiri jika ada keluhan sakit dan belum menggunakan fasilitas kesehatan dalam berobat. Berbagai pendekatan penanganan penduduk yang sakit agar menggunakan fasilitas kesehatan dalam berobat menunjukkan kondisi belum efektif.

2.3.2.7 Angka Mordibitas

Angka Morbiditas merupakan angka yang menunjukkan tingkat kesakitan akibat gangguan struktur maupun fungsi tubuh seseorang yang merupakan derajat sakit, cedera maupun gangguan pada populasi yang merupakan penyimpangan dari status sehat atau kesejahteraan suatu masyarakat (BPS). Semakin tinggi morbiditas, menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang semakin buruk.

Gambar 2.9
Angka Mordibitas (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022



Sejak tahun 2018-2020, tingkat kesakitan di Kota Lhokseumawe mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan persentase tingkat kesakitan terendah pada tahun 2019 dengan angka 11,38. Setelah tahun 2019, perkembangan tingkat kesakitan mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi sebesar 16,99%, dimana seiring dengan mulainya pandemi *covid-19*. Penurunan angka morbiditas Kota Lhokseumawe relevan dengan

penurunan secara nasional. Dimana setiap tahun selalu berada dibawah angka rata-rata nasional dan provinsi sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Hanya pada saat pandemi *covid-19*, angka morbiditas Kota Lhokseumawe berada diatas angka rata-rata nasional dan provinsi.

2.3.2.8 Cakupan Tingkat Prevalensi Tuberkulosis

Dalam rencana strategis Kementerian kesehatan telah dirumuskan bahwa penanganan Prevalensi Tuberkulosis (TB) ini merupakan bagian dari indikator utama meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

Penyakit TBC paru yang disebabkan terjadi ketika daya tahan tubuh menurun. Dalam perspektif epidemiologi yang melihat kejadian penyakit sebagai hasil interaksi antar tiga komponen pejamu (host), penyebab (agent), dan lingkungan (environment) dapat ditelaah faktor risiko dari simpul-simpul tersebut. Pada sisi pejamu, kerentanan terhadap infeksi *Mycobacterium tuberculosis* sangat dipengaruhi oleh daya tahan tubuh seseorang pada saat itu. Pengidap HIV AIDS atau orang dengan status gizi yang buruk lebih mudah untuk terinfeksi dan terjangkit TBC.

Tabel 2.7. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2021

No	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	633	230	297	569
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	203.204	204.284	211.123	210.179
Persentase		311,5	112,5	140,6	270

Sumber: Dinkes Kota Lhokseumawe, 2021

Dari tahun 2018-2022 prevalensi Tuberkulosis mengalami perkembangan yang fluktuatif membaik hingga tahun 2020, dan kembali meningkat pada tahun 2021. Berdasarkan data di atas,

banyaknya pengidap Tuberkolosis di Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 yaitu sebanyak 569 orang dari 210.179 jumlah penduduk di Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2018 menjadi angka terbanyak dalam 4 tahun terakhir banyaknya pengidap Tuberkolosis.

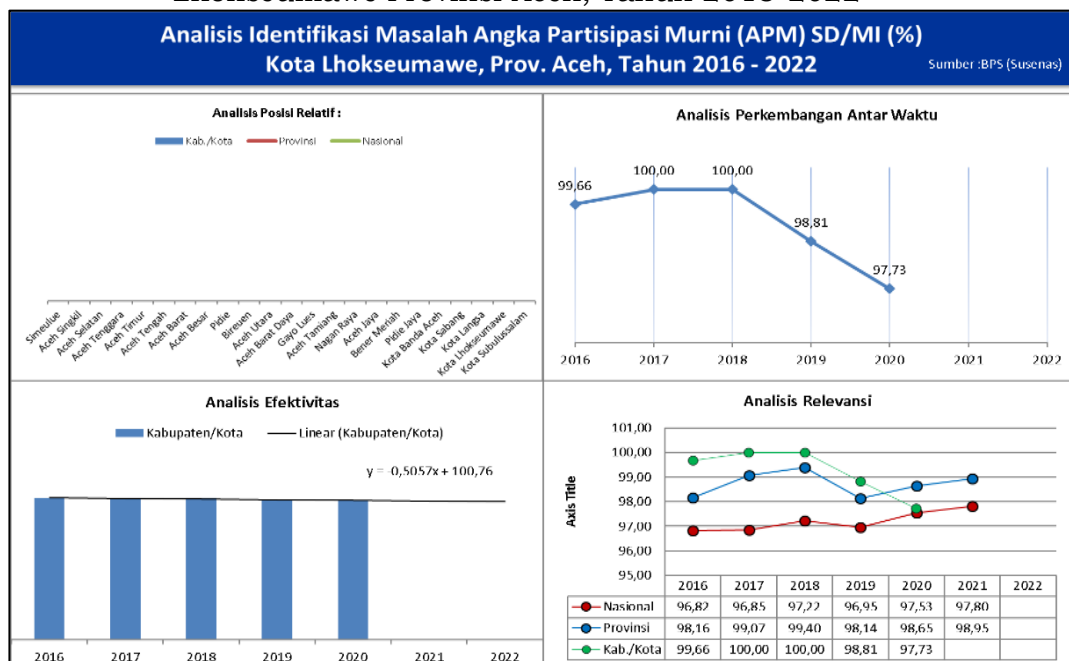
2.3.3. Dimensi Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar untuk setiap manusia sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.

2.3.3.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak Sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya, indikator ini akan menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

Gambar 2.10 Analisis Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Tahun 2018-2022



Analisis perkembangan antar waktu menunjukkan, dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) Angka Partisipasi Murni masyarakat Kota Lhokseumawe untuk menyekolahkan anaknya usia 7 s/d 12 tahun di SD/MI memperlihatkan naik turun dari tahun ketahun, kenaikan (partisipasi masyarakat) tersebut mencapai maksimal pada tahun 2017 dan tahun 2018.

Jika merujuk pada gambar Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni SD/MI (AMP SD/MI) masyarakat untuk menyekolahkan anak pada tahun 2017 dan tahun 2018 mencapai maksimal adalah 100%. Capaian ini lebih baik dari capaian Provinsi Aceh tahun 2017 (99,07%) dan tahun 2018 (99,04%) dan capaian Nasional tahun 2017(96,85%) dan tahun 2018 (97,22%). Jika dilihat pada tahun 2020, capaian Angka Partisipasi Murni SD/MI (AMP SD/MI) Kota Lhokseumawe adalah 97,73%. Capaian ini menurun dibandingkan dengan tahun 2017 dan tahun 2018, dimana pada tahun 2017 dan tahun 2018 capaiannya sangat baik, namun pada tahun 2020 Kota Lhokseumawe berada pada posisi dibawah Provinsi Aceh (98,65%) dan sedikit lebih baik dari Nasional (97,53%).

Dari capaian Angka Partisipasi Murni SD/MI Kota Lhokseumawe tahun 2020 adalah 97,73%, mengartikan bahwa, pada tahun tersebut, terdapat 2,27% anak usia 7-12 tahun (usia SD/MI) yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah. Merujuk kepada data P3KE Kemenko PMK tahun 2022, menunjukkan bahwa terdapat 654 anak-anak dalam usia 7-12 tahun (SD/MI) di Kota Lhokseumawe yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah.

Tabel 2.8.

Jumlah anak usia sekolah, 7-12 Tahun (SD/MI), 13-15 Tahun (SMP/Mts) dan 16-18 Tahun (SMA/MA), yang bersekolah dan tidak bersekolah, menurut Kecamatan di Kota Lhokseumawe

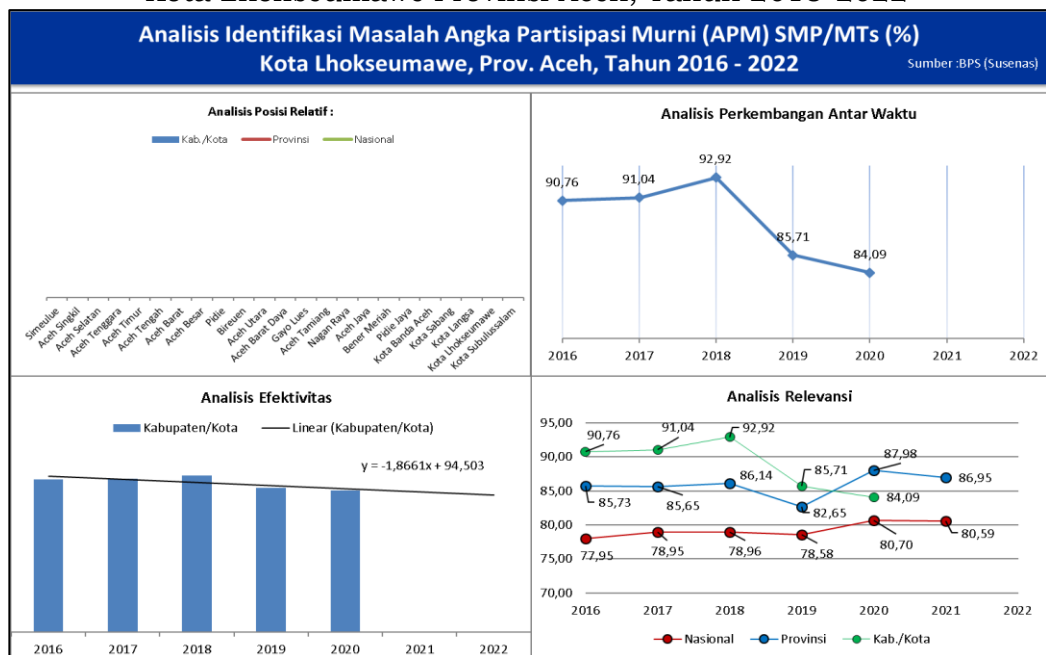
No	Kecamatan	Bersekolah				Tidak Bersekolah			
		Jumlah	7-12 tahun	13-15 tahun	16-18 tahun	Jumlah	7-12 tahun	13-15 tahun	16-18 tahun
	Total (4)	18.448	7.864	5.519	5.065	3.446	3.187	156	103
1.	Muara Dua	4.575	1.953	1.389	1.233	885	810	49	26
2.	Banda Sakti	6.548	2.737	1.954	1.857	1.219	1.092	76	51
3.	Blang Mangat	3.479	1.580	1.007	892	656	631	15	10
4.	Muara Satu	3.846	1.594	1.169	1.083	686	654	16	16

Sumber: Data P3KE, Kemenko PMK 2022

Dari sebaran kecamatan-kecamatan di Kota Lhokseumawe, menunjukkan bahwa, anak-anak usia 7-12 tahun yang paling banyak tidak bersekolah adalah di Kecamatan Banda Sakti (1.092 anak), dilanjutkan dengan Kecamatan Muara Dua (810 anak), kecamatan Muara Satu (654 anak). Sedangkan kecamatan paling rendah anak putus sekolah dalam usia 7-12 tahun adalah Kecamatan Blang Mangat (631 anak).

2.3.3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts (%)

Gambar 2.11 Analisis Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Tahun 2018-2022



Analisis perkembangan antar waktu menunjukkan, dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) Angka Partisipasi Murni masyarakat Kota Lhokseumawe untuk menyekolahkan anaknya usia 13 s/d 15 tahun di SMP/MTs memperlihatkan naik turun dari tahun ketahun yang menurun, angka tertinggi terjadi pada tahun 2018.

Jika merujuk pada gambar Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni SMP/MTs (AMP SMP/MTs) masyarakat untuk menyekolahkan anak pada tahun 2018 mencapai angka tertinggi adalah 92,92%. Capaian ini lebih baik dari capaian Provinsi Aceh tahun 2018 (86,14%) dan capaian Nasional tahun 2018 (78,96%). Jika dilihat pada tahun 2020, capaian Angka Partisipasi Murni SMP/MTs (AMP SMP/MTs) Kota Lhokseumawe adalah 84,09%. Capaian ini menurun dibandingkan dengan tahun 2018, dimana pada tahun 2018 capaiannya sangat baik, namun pada tahun 2020 Kota Lhokseumawe berada pada posisi dibawah Provinsi Aceh (87,98%) dan sedikit lebih baik dari Nasional (80,70%).

Dari capaian Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kota Lhokseumawe tahun 2020 adalah 84,09%, mengartikan bahwa, pada tahun tersebut, terdapat 15,91% anak usia 13-15 tahun (usia SMP/MTs) yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah. Merujuk kepada data P3KE Kemenko PMK tahun 2022, menunjukkan bahwa terdapat 156 anak-anak dalam usia 13-15 tahun (SMP/MTs) di Kota Lhokseumawe yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah.

Tabel 2.9.
Jumlah anak usia sekolah, 7-12 Tahun (SD/MI), 13-15 Tahun (SMP/Mts) dan 16-18 Tahun (SMA/MA), yang bersekolah dan tidak bersekolah, menurut Kecamatan di Kota Lhokseumawe

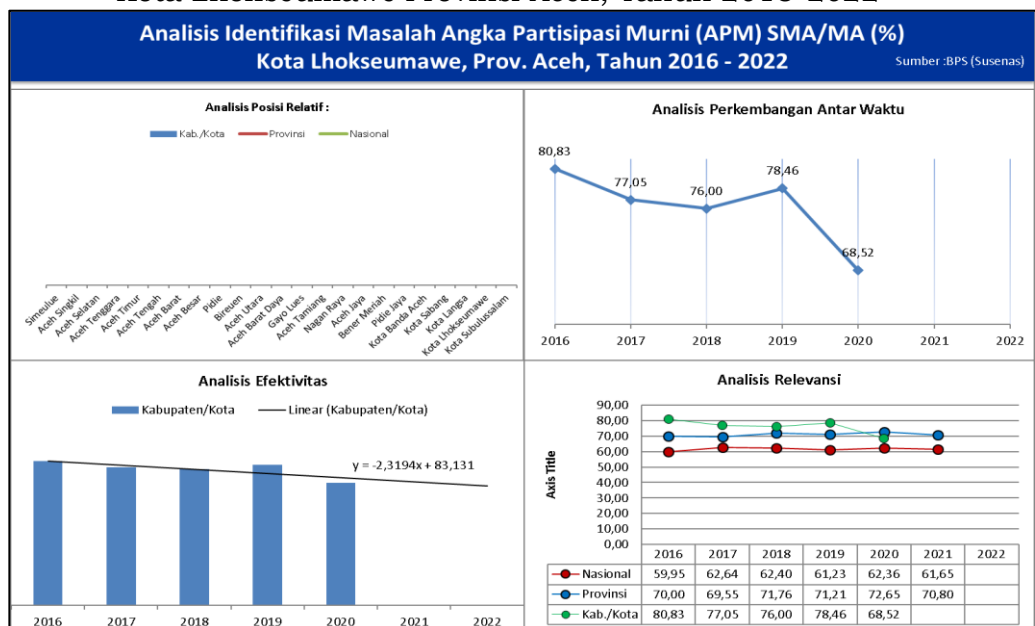
No	Kecamatan	Bersekolah				Tidak Bersekolah			
		Jumlah	7-12 tahun	13-15 tahun	16-18 tahun	Jumlah	7-12 tahun	13-15 tahun	16-18 tahun
	Total (4)	18.448	7.864	5.519	5.065	3.446	3.187	156	103
1.	Muara Dua	4.575	1.953	1.389	1.233	885	810	49	26
2.	Banda Sakti	6.548	2.737	1.954	1.857	1.219	1.092	76	51
3.	Blang Mangat	3.479	1.580	1.007	892	656	631	15	10
4.	Muara Satu	3.846	1.594	1.169	1.083	686	654	16	16

Sumber: Data P3KE, Kemenko PMK 2022

Dari sebaran kecamatan-kecamatan di Kota Lhokseumawe, menunjukkan bahwa, anak-anak usia 13-15 tahun yang paling banyak tidak bersekolah adalah di Kecamatan Banda Sakti (76 anak), dilanjutkan dengan Kecamatan Muara Dua (49 anak), kecamatan Muara Satu (16 anak). Sedangkan kecamatan paling rendah anak putus sekolah dalam usia 13-15 tahun adalah Kecamatan Blang Mangat (15 anak).

2.3.3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)

Gambar 2.12 Analisis Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Tahun 2018-2022



Analisis perkembangan antar waktu menunjukkan, dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) Angka Partisipasi Murni masyarakat Kota Lhokseumawe untuk menyekolahkan anaknya usia 16 s/d 18 tahun di SMA/MA memperlihatkan naik turun dari tahun ketahun yang menurun, angka tertinggi terjadi pada tahun 2016. Jika merujuk pada gambar Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni SMA/MA (AMP SMA/MA) masyarakat untuk menyekolahkan anak pada tahun 2016 mencapai angka tertinggi adalah 80,83%. Capaian ini lebih baik dari capaian Provinsi Aceh tahun 2016 (70%) dan capaian Nasional tahun 2016 (59,95%). Jika dilihat pada tahun 2020, capaian Angka Partisipasi Murni SMA/MA (AMP SMA/MA) Kota Lhokseumawe adalah 68,52%. Capaian ini sangat menurun dibandingkan dengan tahun 2016, dimana pada tahun 2016 capaiannya sangat baik, namun pada tahun 2020 Kota Lhokseumawe berada pada posisi dibawah Provinsi Aceh (72,65%) dan sedikit lebih baik dari Nasional (62,36%).

Dari capaian Angka Partisipasi Murni SMA/MA Kota Lhokseumawe tahun 2020 adalah 68,52%, mengartikan bahwa, pada tahun tersebut, terdapat 31,48% anak usia 16-18 tahun (usia SMA/MA) yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah. Merujuk kepada data P3KE Kemenko PMK tahun 2022, menunjukkan bahwa terdapat 103 anak-anak dalam usia 16-18 tahun (SMA/MA) di Kota Lhokseumawe yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah.

Tabel 2.10.
Jumlah anak usia sekolah, 7-12 Tahun (SD/MI), 13-15 Tahun (SMP/Mts) dan 16-18 Tahun (SMA/MA), yang bersekolah dan tidak bersekolah, menurut Kecamatan di Kota Lhokseumawe

No	Kecamatan	Bersekolah				Tidak Bersekolah			
		Jumlah	7-12 tahun	13-15 tahun	16-18 tahun	Jumlah	7-12 tahun	13-15 tahun	16-18 tahun
	Total (4)	18.448	7.864	5.519	5.065	3.446	3.187	156	103
1.	Muara Dua	4.575	1.953	1.389	1.233	885	810	49	26
2.	Banda Sakti	6.548	2.737	1.954	1.857	1.219	1.092	76	51
3.	Blang Mangat	3.479	1.580	1.007	892	656	631	15	10
4.	Muara Satu	3.846	1.594	1.169	1.083	686	654	16	16

Sumber: Data P3KE, Kemenko PMK 2022

Dari sebaran kecamatan-kecamatan di Kota Lhokseumawe, menunjukkan bahwa, anak-anak usia 16-18 tahun yang paling banyak tidak bersekolah adalah di Kecamatan Banda Sakti (51 anak), dilanjutkan dengan Kecamatan Muara Dua (26 anak), kecamatan Muara Satu (16 anak). Sedangkan kecamatan paling rendah anak putus sekolah dalam usia 16-18 tahun adalah Kecamatan Blang Mangat (10 anak).

2.3.4. Dimensi Infrastruktur

Analisis bidang infrastruktur dasar yang merupakan salah satu karekteristik terpenting dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, kondisi perumahan rakyat dan kawasan permukiman ini juga menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan daerah yang dapat menjadi faktor meningkatnya kemiskinan.

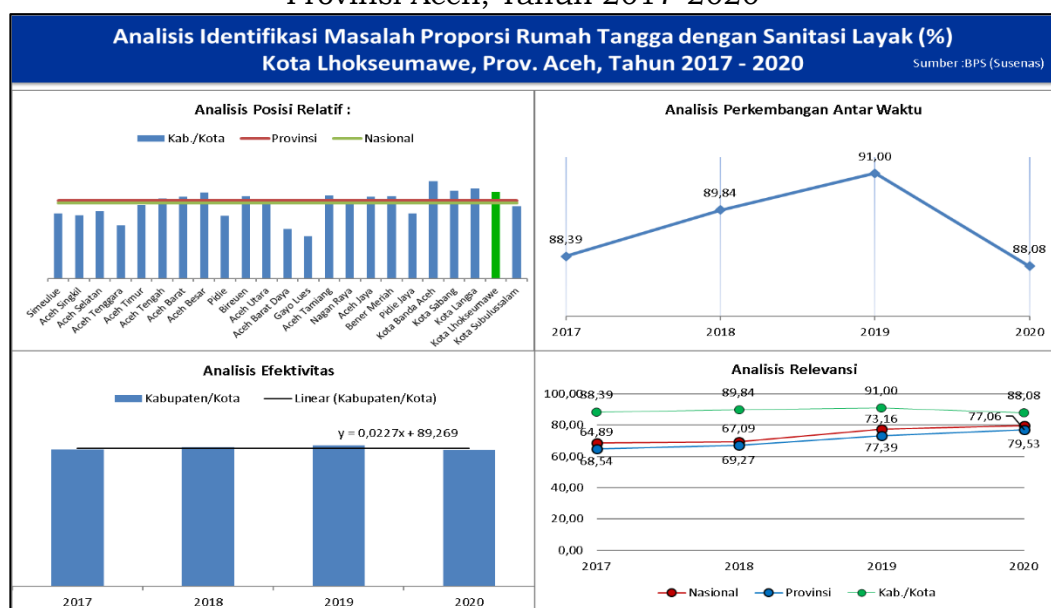
2.3.4.1 Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut

digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. (BPS).

Rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak apabila rumah tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan.

Gambar 2.13
Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kota Lhokseumawe
Provinsi Aceh, Tahun 2017-2020



Dalam kurun waktu tahun 2017-2020, proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kota Lhokseumawe terus mengalami perkembangan fluktuatif. Namun pada tahun 2020, mengalami penurunan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak dari 91% pada tahun 2019 turun menjadi 88,08%. Efektifitas dari proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 sedikit menurun persentase rumah bersanitasi layak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dibandingkan perkembangan nasional, proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak Kota Lhokseumawe berada diatas angka rata-rata nasional dan provinsi sejak kurun 2017-2020.

Berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Kemenko PMK Tahun 2022, menunjukkan bahwa, 40% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah di Kota Lhokseumawe berdasarkan kepemilikan jamban, beikut infomarsi berdasarkan kecamatannya:

Tabel 2.11
Rumah Tangga Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah di Kota Lhokseumawe Berdasarkan Kepemilikan Jamban

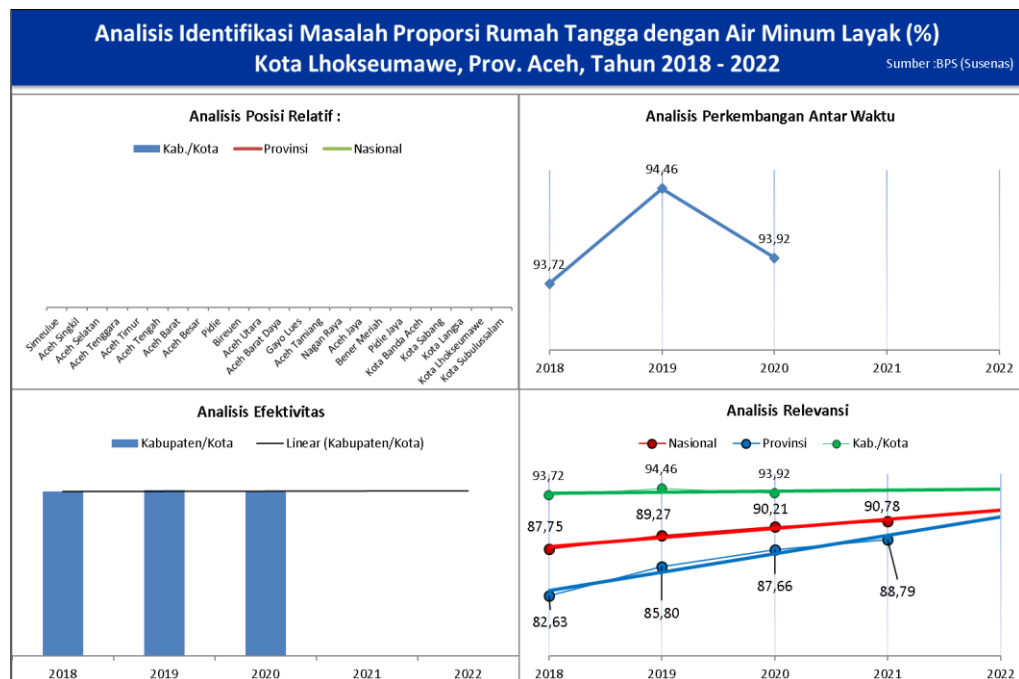
No	Kecamatan	Dengan Septik Tank	Tanpa Septik Tank	Jamban Umum	Lainnya
	Total (4)	15.296	1.133	752	248
1.	Muara Dua	4.108	91	199	19
2.	Banda Sakti	5.104	629	172	68
3.	Blang Mangat	2.997	271	202	45
4.	Muara Satu	3.087	142	179	116

Sumber: Data P3KE, Kemenko PMK 2022

2.3.4.2 Rumah Tangga dengan Air Minum Layak

Rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak mengacu konsep terbaru tahun 2019 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Merujuk pada konsep ini sumber air minum layak jika sumber air minum utama yang digunakan meliputi ledeng, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Konsep air minum layak mengacu konsep terbaru berdasarkan Surat Kementerian

Gambar 2.14
Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%)
Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2020



Dari tahun 2018-2020 perkembangan antar waktu capaian Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak masih rendah. Pada tahun 2018 proporsi rumah tangga dengan air minum layak sebesar 93,72%, di tahun 2019 naik sebesar 0,74% yaitu sebesar 94,46%. Tahun 2020 capaiannya turun sebesar 0,54%.

Penurunan efektifitas penanganan akses air minum layak di kota Lhokseumawe ini disebabkan karena Kota Lhokseumawe tidak terdapat air baku. Sebagian besar penduduk Kota Lhokseumawe menggunakan air dari PDAM Tirta Mon Pase yang berasal dari Aceh Utara.

Pencapaian penanganan akses air minum layak provinsi pada tahun 2018 sebesar 87,75%, tahun 2019 meningkat sebesar 1,52% atau 89,27%, sedangkan pada tahun 2020 kembali naik sebesar 0,94% atau 90,21%. Sedangkan

efektifitas Nasional masih di bawah kota dan provinsi, yaitu pada tahun 2018 sebesar 82,63% dan terus meningkat sampai dengan tahun 2021 sebesar 88,79%.

Sedangkan berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Kemenko PMK Tahun 2022, menunjukkan bahwa, 40% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah di Kota Lhokseumawe berdasarkan sumber air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat berdasarkan kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12
Jumlah Rumah Tangga di Kota Lhokseumawe Berdasarkan Sumber Air Minum Yang Dapat Dikonsumsi Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Air Kemasan / Isi Ulang	Leding / PAM	Sumber Terlindung	Sumber Tidak Terlindung	Lainnya
	Total (4)	11.778	679	4.759	150	63
1.	Muara Dua	2.604	108	1.674	31	0
2.	Banda Sakti	5.039	69	771	33	61
3.	Blang Mangat	1.900	33	1.539	41	2
4.	Muara Satu	2.235	469	775	45	0

Sumber: Data P3KE, Kemenko PMK 2022

2.3.4.3 Rumah Tangga dengan Akses Listrik

Capaian indikator Proporsi Rumah Tangga dengan akses listrik PLN Kota Lhokseumawe tahun 2022 adalah 100%, artinya semua rumah tangga penduduk Kota Lhokseumawe sudah memiliki listrik.

Tabel 2.13. Persentase rumah tangga menurut Kabupaten/Kota, jenis kelamin KRT, dan sumber penerangan Provinsi Aceh Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki + Perempuan			
	Xlistrik				Xlistrik				Xlistrik			
	Listrik PLN	Listrik non PLN	Bukan listrik	Total	Listrik PLN	Listrik non PLN	Bukan listrik	Total	Listrik PLN	Listrik non PLN	Bukan listrik	Total
SIMEULUE	98,32	0,57	1,12	100	99,74	0,00	0,26	100	98,52	0,49	0,99	100
ACEH SINGKIL	99,45	0,55	0,00	100	100,00	0,00	0,00	100	99,53	0,47	0,00	100
ACEH SELATAN	99,45	0,28	0,27	100	100,00	0,00	0,00	100	99,57	0,22	0,21	100
ACEH TENGGARA	99,92	0,00	0,08	100	100,00	0,00	0,00	100	99,93	0,00	0,07	100
ACEH TIMUR	99,92	0,00	0,08	100	100,00	0,00	0,00	100	99,93	0,00	0,07	100
ACEH TENGAH	99,83	0,00	0,17	100	100,00	0,00	0,00	100	99,85	0,00	0,15	100
ACEH BARAT	99,97	,03	0,00	100	100,00	0,00	0,00	100	99,98	0,02	0,00	100
ACEH BESAR	100,00	0,00	0,00	100	99,28	0,43	0,29	100	99,87	0,08	0,05	100
PIDIE	100,00	0,00	0,00	100	99,89	0,00	0,11	100	99,97	0,00	0,03	100
BIREUEN	99,29	0,00	0,71	100	100,00	0,00	0,00	100	99,48	0,00	0,52	100
ACEH UTARA	99,58	0,00	0,42	100	99,49	0,00	0,51	100	99,56	0,00	0,44	100
ACEH BARAT DAYA	100,00	0,00	0,00	100	100,00	0,00	0,00	100	100,00	0,00	0,00	100
GAYO LUES	96,48	3,37	0,15	100	98,50	1,50	0,00	100	96,72	3,15	0,13	100
ACEH TAMIANG	99,34	0,66	0,00	100	100,00	0,00	0,00	100	99,43	0,57	0,00	100
NAGAN RAYA	100,00	0,00	0,00	100	100,00	0,00	0,00	100	100,00	0,00	0,00	100
ACEH JAYA	99,71	0,00	0,29	100	100,00	0,00	0,00	100	99,76	0,00	0,24	100
BENER MERIAH	99,36	0,44	0,20	100	100,00	0,00	0,00	100	99,45	0,38	0,17	100
PIDIE JAYA	99,86	0,00	0,14	100	100,00	0,00	0,00	100	99,90	0,00	0,10	100
BANDA ACEH	99,78	0,22	0,00	100	100,00	0,00	0,00	100	99,81	0,19	0,00	100
SABANG	98,92	0,00	1,08	100	99,34	0,00	0,66	100	98,98	0,00	1,02	100
LANGSA	100,00	0,00	0,00	100	100,00	0,00	0,00	100	100,00	0,00	0,00	100
LHOKSEUMAWE	100,00	0,00	0,00	100	100,00	0,00	0,00	100	100,00	0,00	0,00	100
SUBULUSSALAM	100,00	0,00	0,00	100	100,00	0,00	0,00	100	100,00	0,00	0,00	100
PROVINSI	99,65	0,17	00,18	100	99,84	,05	0,11	100	99,69	0,15	,16	100

Sumber: Hasil pengolahan data Susenas Maret 2022.

Sedangkan berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Kemenko PMK Tahun 2022, menunjukkan bahwa, 40% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah di Kota Lhokseumawe berdasarkan sumber penerangan yang dimiliki oleh rumah tangga berdasarkan Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14. Jumlah Rumah Tangga Di Kota Lhokseumawe Berdasarkan Sumber Penerangan Yang Dimiliki Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik
	Total (4)	16.906	481	42
1.	Muara Dua	4.317	85	15
2.	Banda Sakti	5.793	175	5
3.	Blang Mangat	3.428	76	11
4.	Muara Satu	3.368	145	11

Sumber: Data P3KE, Kemenko PMK 2022

Tabel 2.15. Hasil Evaluasi Anggaran Belanja Menurut Jenis Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan	2.09.03.2.04.02	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	30,000,000	DAU	28,924,705	Kota Lhokseumawe	1 Laporan
2	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan	3.25.03.2.02.01	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1,815,900,000	DID / DOKA	1,704,696,750	Kota Lhokseumawe	10 Individu dan 3 Kelompok
3	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan	3.25.03.2.02.02	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	35,000,000	DAU	32,879,870	Kota Lhokseumawe	1 Laporan
4	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan	3.25.04.2.04.02	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10,000,000	DAU	3,527,000	Kota Lhokseumawe	1 Laporan
5	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan	3.25.04.2.04.03	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10,000,000	DAU	8,939,525	Kota Lhokseumawe	1 Laporan

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan	3.25.04.2.04.06	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	1,820,900,000	Dana Insentif Fiskal / DAU	1,143,335,022	Mns. Mee, Mns. Mesjid, Mon Geudong, Panggoi, Ujong Blang, Tunong, Meuria Paloh	8 Individu dan 15 Kelompok
7	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan	3.27.02.2.01.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	190,504,900	DID / Dana Insentif Fiskal	141,631,600	Kota Lhokseumawe	3 Kelompok
8	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan	3.27.03.2.02.09	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	320,000,000	DID	315,372,000	Kota Lhokseumawe	1 Kelompok
9	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan	3.27.05.2.01.01	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	19,500,000	DAU	17,411,600	Kota Lhokseumawe	1 Laporan
10	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan	3.27.07.2.01.02	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	170,000,000	DAU	160,460,000	Kota Lhokseumawe	1 Laporan

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	2.17.08.2.01.01	Program Pengembangan UMKM	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1,525,000,000	DANA INSETIF FISKAL/ DID, DOKA	1,033,259,635	Kec. Banda Sakti & Kota Lhokseumawe	100 Unit usaha
12	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	2.13.04.2.01.03	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	25,000,000	DAU	24,999,635	4 Kecamatan / 68 Gampong	68 Dokumen
13	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	2.13.04.2.01.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	148,000,000	DAU	129,857,128	4 Kecamatan / 68 Gampong	68 Dokumen
14	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	2.13.04.2.01.13	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	30,000,000	DAU	16,199,350	4 Kecamatan / 68 Gampong	68 Dokumen
15	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	2.13.05.2.01.02	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	126,997,050	DAU	114,175,130	4 Kecamatan / 68 Gampong	68 Gampong

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
16	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	2.13.05.2.01.05	Program Perberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	30,000,000	DAU	20,474,990	4 Kecamatan / 68 Gampong	68 Dokumen
17	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	2.13.05.2.01.09	Program Perberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	230,000,000	DAU	212,294,793	4 Kecamatan / 68 Gampong	68 Dokumen
18	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.03.08	Program Pendaftaran Penduduk	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	15,000,000	DAU	14,804,320	4 Kecamatan	46800 Dokumen

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.02	Program Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	25,000,000	DAU	24,857,190	4 Kecamatan	1 Layanan
20	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.04	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	20,000,000	DAU	18,841,645	68 Gampong	12 Laporan
21	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.04.2.03.08	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	155,000,000	DAU	150,626,000	4 Kecamatan	12 Dokumen
22	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.05.2.01.01	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	5,000,000	DAU	4863140	4 Kecamatan	2 Dokumen
23	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.08.03.2.02.02	Program Perlindungan Perempuan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	138,736,000	DAK NON FISIK	24,997,000	4 Kecamatan , 68 desa di Kota Lhokseumawe	120 Layanan

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kewenangan Kabupaten/Kota					
24	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.08.06.2.01.01	Program Pemenuhan Hak Anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	49,045,410	DAU	6,383,800	4 Kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe	7 Organisasi
25	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	2.07.03.2.01.01	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	783,173,200	DAU, Dana Insentif Fiskal	199,999,381	Lhokseumawe	87 Orang
26	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	1.06.02.2.03.01	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	28,757,000	APBK	28,757,000	Lhokseumawe	50 orang
27	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Sosial	1.06.02.2.03.03	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga	1,976,400,000	APBK dan DID	1,836,923,730	Lhokseumawe	50 keluarga

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Kewenangan Kabupaten/Kota					
28	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	1.06.02.2.03.04	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	63,680,000	APBK	63,236,155	Lhokseumawe	5 Lembaga
29	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	1.06.04.2.01.01	Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Permakanan	265,000,000	APBK dan DID	264,670,645	Lhokseumawe	100 Orang
30	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	1.06.04.2.01.03	Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Alat Bantu	500,000,000	DOKA	486,435,528	Lhokseumawe	50 Orang
31	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	1.06.04.2.01.06	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	26,201,000	APBK	25,920,405	Lhokseumawe	200 Orang
32	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	1.06.04.2.01.07	Program Rehabilitasi Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,	49,384,200	APBK	49,286,900	Lhokseumawe	80 Orang

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak					
33	Mengurangi Beban Pengeluaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.01.02	Program Penanggulangan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	15,000,000	DAU	14,999,640	SMPN 4, 7, 12 Lhokseumawe, SMPS Islam Pase, SMKN 7 Lhokseumawe, SMAN 1, 2, 6 Lhokseumawe, SMKN 4 Lhokseumawe	5000 Orang
34	Mengurangi Beban Pengeluaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.03.03	Program Penanggulangan Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50,000,000	DAU	50,000,000	HIBAH SAR Kota Lhokseumawe	300 Orang
35	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.03.03.2.01.17	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2,648,866,000	APBK	2,211,023,285	Muara Satu, Banda Sakti, Muara Dua, Blang Mangat	100 rumah tangga
36	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.03.05.2.01.01	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	9,241,083,000	DAK/DAU	9,241,083,000	Kota Lhokseumawe	1 dokumen

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.04.03.2.02.02	Program Kawasan Permukiman	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	245,000,000	DAU	221,720,145	Kota Lhokseumawe	1 dokumen
38	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.04.03.2.03.02	Program Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	393,350,650	DAU	365,431,250	Kota Lhokseumawe	25 unit
39	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.04.03.2.03.08	Program Kawasan Permukiman	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	5,148,595,680	DOKA/ DAU	4,460,960,000	Kota Lhokseumawe	48 unit
40	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.04.05.2.01.02	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	5,855,000,000	DAU	3,730,280,000	Kota Lhokseumawe	4 lokasi
41	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	1.01.08.7.02.03	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Nonformal bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh	315,000,000	DAU	0	-	30 Satuan Pendidikan

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	9.01.04.7.03.01	Program Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	2,040,000,000	ZIS	2,020,000,000	4 Kecamatan	2020 orang
43	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	9.01.04.7.03.02	Program Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	2,249,000,000	ZIS	2,171,000,000	4 Kecamatan	1567 orang
44	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	9.01.04.7.03.03	Program Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	670,400,000	ZIS	670,400,000	4 Kecamatan	113 orang
45	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	9.01.04.7.03.04	Program Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	45,000,000	ZIS	21,000,000	4 Kecamatan	7 orang
46	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	9.01.04.7.03.05	Program Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	15,000,000	ZIS	10,000,000	4 Kecamatan	4 orang
47	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	9.01.04.7.03.06	Program Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	58,000,000	ZIS	58,000,000	4 Kecamatan	58 orang
48	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	9.01.04.7.03.07	Program Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	285,000,000	ZIS	284,000,000	4 Kecamatan	235 orang
49	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	9.01.04.7.03.08	Program Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	1,499,700,000	ZIS	1,471,460,000	4 Kecamatan	331 orang
50	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru	250,000,000	DOKA	121,544,500	1 Kecamatan	2 Ruang
51	Meminimalkan Wilayah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.01.06	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,337,141,000	DAK, DAU, DAN DOKA	666,327,368	4 Kecamatan	2 Unit

**RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA LHOSEUMAWE TAHUN 2024**

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kantong Kemiskinan									
52	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.01.08	Program Pengelolaan Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	842,844,000	DAK	404,052,518	4 Kecamatan	5 Ruang
53	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.01.12	Program Pengelolaan Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	113,313,000	DAK	56,490,638	4 Kecamatan	5 Unit
54	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.01.17	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Siswa	341,850,000	DAU	170,422,188	4 Kecamatan	300 Unit
55	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.01.29	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	17,111,600,000	DAK NON FISIK	4,277,900,000	4 Kecamatan	110 Satuan Pendidikan
56	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.02.12	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	346,561,000	DAU DAN DAK	172,636,390	4 Kecamatan	5 Unit
57	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.02.14	Program Pengelolaan Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2,309,307,000	DAK	1,101,424,745	4 Kecamatan	5 Ruang
58	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.02.24	Program Pengelolaan Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	113,313,000	DAK	56,435,325	4 Kecamatan	2 Unit

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.02.42	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9,009,800,000	DAK NON FISIK	2,252,450,000	4 Kecamatan	25 Satuan Pendidikan
60	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.03.18	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2,862,950,000	DAK NON FISIK	715,737,500	4 Kecamatan	152 Satuan Pendidikan
61	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.04.17	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	474,540,000	DAK NON FISIK	118,635,000	4 Kecamatan	2 Satuan Pendidikan
62	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.22.03.2.01.01	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	50,500,000	DAU	25,250,000	4 Kecamatan	100 Orang
63	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	2.23.02.2.02.01	Program Pembinaan Perpustakaan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	10,952,235	APBK	4,980,000	Kecamatan Blang Mangat, Banda Sakti, Muara Dua dan Muara Satu	80 Lokus
64	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Syariat Islam	1.01.07.7.01.04	Program Pendidikan Dayah	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	505,000,000	APBK	2,800,000.00	4 Kecamatan	14 Peserta Didik

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.01	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	361,200,000	DBH-PR	18,300,000	30 Desa	100 persen
66	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	90,000,000	DBH-PR	15,089,466	-	4.084 orang
67	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.03	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	70,000,000	DBH-PR	67,320,640	30 Desa	4.389 orang
68	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.04	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	200,000,000	DBH-PR	89,512,450	30 Desa	1.681 orang
69	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.05	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	130,000,000	DBH-PR	39,446,169	40 Sekolah	27.366 orang

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.06	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	311,000,000	DBH-PR	274,677,220	68 Desa	136.127 orang
71	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.07	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	150,000,000	DBH-PR	700,000	-	24.455 orang
72	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.08	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	80,000,000	DBH-PR	36,422,754	Kota Lhokseumawe	41.949. orang
73	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.09	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	581,276,000	DBH-PR	573,575,303	Kota Lhokseumawe	4.577 orang
74	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.10	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	130,000,000	DBH-PR	76,316,572	Kota Lhokseumawe	452 orang

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	322,800,000	DBH-PR DAN DAKNON FISIK	277,154,000	Kecamatan Muara Satu, Muara Dua, Banda Sakti dan Blang Mangat	3.431 orang
76	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.12	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	184,000,000	DBH-PR DAN DAK NON FISIK	122,777,200	Kecamatan Muara Satu, Muara Dua, Banda Sakti dan Blang Mangat	7.069 orang
77	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.17	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	152,420,000	DBH-PR DAN DAK NON FISIK	152,397,200	7 Faskes	10 dokumen
78	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.21	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	30,000,000	DBH-PR	19,441,568	Kota Lhokseumawe	100 orang
79	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.22	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	275,000,000	DBH-PR	166,052,617	Kota Lhokseumawe	50 orang

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Realisasi Anggaran (Rp)	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.25	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	270,000,000	DBH-PR	192,580,000	Kecamatan Muara Satu, Muara Dua, Banda Sakti dan Blang Mangat	10 dokumen
81	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.26	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	13,100,609,547	JKN	9,944,311,859	Kecamatan Muara Dua, Muara satu, Banda sakti dan Blang Mangat	7 dokumen
82	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.39	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	20,000,000	-	-	-	200 Keluarga
TOTAL						93,549,150,872		57,523,560,080		

BAB III

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2024

3.1.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

- ❖ Dukungan politik, komitmen dan kesungguhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi syarat utama dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- ❖ Kepemimpinan langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi syarat utama dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- ❖ Meningkatkan efektivitas setiap nilai rupiah, program dan anggaran oleh seluruh perangkat daerah agar menjawab apa masalah, menjawab akar masalah, menjawab di mana masalah itu terjadi dan memastikan ketepatan individu dan rumah tangga penerima manfaat secara tepat dan benar.
- ❖ Meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan program oleh seluruh perangkat daerah.
- ❖ Pemerintah daerah melakukan upaya pengendalian inflasi dan memastikan harga komoditi-komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin agar murah, tersedia dan terjangkau.
- ❖ Menggunakan data P3KE dalam penjangkauan dan penajaman sasaran intervensi oleh seluruh perangkat daerah.
- ❖ Memperkuat peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk dalam meningkatkan koordinasi

dan pengendalian pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.

- ❖ Memastikan program perlindungan sosial yang digulirkankan oleh pemerintah pusat dapat diterima secara tepat oleh masyarakat sasaran.

3.1.2. Kebijakan Pendidikan

- ❖ Perlunya perhatian pemerintah Kota Lhokseumawe untuk terus meningkatkan partisipasi pendidikan usia sekolah melalui program pemberian beasiswa kepada siswa miskin dan rentan.
- ❖ Meningkatkan dan mengoptimalkan program penjarangan anak putus sekolah melalui program Kejar Paket A dan Paket B dalam meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun.
- ❖ Mengarustamakan intervensi program pendidikan inklusif terutama bagi yang berkebutuhan khusus.
- ❖ Perlu dipertimbangkan adanya kebijakan melakukan regrouping atau penggabungan beberapa sekolah yang tidak dapat memenuhi standar minimal pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional layanan pendidikan, meningkatkan mutu dan produktivitas proses belajar mengajar di kelas, meningkatkan minat dan semangat anak untuk hadir dan belajar di sekolah, memaksimalkan pengawasan terhadap sejumlah sekolah, dan terjadinya pemerataan guru.
- ❖ Melakukan pemerataan tenaga pendidik terutama guru pengajar, baik guru yang berstatus pegawai tetap maupun honorer, khususnya di daerah-daerah pelosok.
- ❖ Meningkatkan persentase alokasi anggaran kegiatan yang mendukung peningkatan mutu kualitas pendidikan dasar seperti peningkatan fasilitas sarana-prasarana sekolah,

terutama pembangunan laboratorium, perpustakaan, serta pengadaan buku dan alat praktik.

- ❖ Alokasi anggaran pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan lebih diarahkan pada bentuk kegiatan untuk peningkatan mutu kompetensi tenaga pendidik, seperti pemberian beasiswa guru untuk melanjutkan program setara S1 dan pelaksanaan uji kompetensi.
- ❖ Mengalokasikan anggaran kegiatan untuk meningkatkan peran dan fungsi dari Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- ❖ Meningkatkan alokasi anggaran untuk proses penilaian akreditasi sekolah khususnya di daerah-daerah terpencil atau daerah dengan akses infrastruktur yang terbatas.
- ❖ Memprioritaskan alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan wilayah (kecamatan dan kampung), sehingga tidak dilakukan dengan pola bagi rata di seluruh wilayah.
- ❖ Perlu dilakukannya pemuktahiran data dalam Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe yang dilakukan setiap tahun dan dapat diakses oleh publik melalui media online (website pemerintah daerah).

3.1.3. Kebijakan Kesehatan

- ❖ Memperkuat basis pelayanan Kesehatan, Ibu dan Anak (KIA) dalam jaminan kesehatan. Dimana pemerintah menanggung premi asuransi bagi masyarakat tidak mampu. Selain itu, cakupan pelayanan ibu hamil, melahirkan, pasca melahirkan dan pelayanan kesehatan anak juga tersedia dalam skema jaminan kesehatan.
- ❖ Melakukan evaluasi kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan untuk mengetahui sejauh mana tenaga medis dan fasilitas kesehatan terdistribusi secara merata dan

berkualitas antar kecamatan atau desa, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

- ❖ Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan pelayanan (SOP) kesehatan terutama di puskesmas, pustu, polindes, posyandu, dan rumah sakit.
- ❖ Meningkatkan pelayanan antar-jemput gratis persalinan terutama penduduk yang tinggal di wilayah terpencil, disertai dengan peningkatan akses infrastruktur terutama jalan menuju tempat persalinan terdekat.
- ❖ Penguatan sistem rujukan internal baik untuk maternal maupun neonatal terutama kepada pasien pasca operasi di RSUD.
- ❖ Penguatan sosialisasi oleh seluruh puskesmas dan puskesmas pembantu mengenai pentingnya kesadaran ibu hamil agar melahirkan di tempat fasilitas kesehatan dengan bantuan tenaga kesehatan terlatih.
- ❖ Mengembangkan sistem deteksi dan kewaspadaan dini penyakit/wabah dengan melibatkan peran serta dari masyarakat di lingkungan setempat, terutama pada ibu hamil, bayi dan balita.
- ❖ Meningkatkan pelaksanaan kegiatan supervisi fasilitatif bidan koordinator di tingkat puskesmas kabupaten hingga tingkat desa, dengan pembinaan aspek klinis, non klinis, logistik dan manajemen KIA.
- ❖ Meningkatkan kompetensi bidan dalam penatalaksanaan pemeriksaan kehamilan/Antenatal Care (ANC) terpadu sehingga tidak hanya mampu mendeteksi dini ibu hamil dengan risiko tinggi tetapi juga mampu mengetahui faktor risiko penyebab komplikasi.

- ❖ Penguatan sistem rujukan balik dari rumah sakit ke puskesmas sehingga setiap kasus neonatal yang terjadi di rumah sakit terdeteksi dengan cepat oleh bidan puskesmas.
- ❖ Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi dengan melakukan pelacakan kasus neonatal risiko tinggi.
- ❖ Revitalisasi program Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan sosialisasi penundaan usia perkawinan.
- ❖ Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan melakukan implementasi kegiatan prioritas untuk penurunan AKI, AKB, dan AKBA. Sehingga anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD dapat terealisasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
- ❖ Meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran dengan mengalokasikan lebih besar porsi anggaran kepada program-program dan kegiatan prioritas untuk penurunan AKI, AKB, dan AKBA. Perlunya peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Upaya ini dilakukan dengan memperluas sosialisasi pentingnya PHBS dan lingkungan sehat oleh dinas-dinas terkait.

3.1.4. Kebijakan Infrastruktur Dasar

- ❖ Revitalisasi sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang kurang memadai terutama di berbagai kantong wilayah kumuh perkotaan, seperti: penyaluran air bersih, pengolahan limbah, sistem pengelolaan sampah, saluran drainase dan penanggulangan banjir, dan perbaikan kondisi jalan.
- ❖ Penajaman ketepatan dan sasaran penerima manfaat program pembangunan rumah layak huni termasuk

pengembangan rumah sehat, pipanisasi air bersih, dan air minum bagi rumah tangga miskin ekstrem, miskin dan rentan miskin.

- ❖ Program dan kegiatan infrastruktur yang telah diagendakan dan dialokasikan dalam anggaran APBD sedapat mungkin segera direalisasikan agar pemenuhan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat dengan kurangnya sarana dan prasarana.
- ❖ Peningkatan kualitas perencanaan, kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman kumuh berdasarkan pada evidence based dan data yang tersedia.
- ❖ Meningkatkan alokasi anggaran untuk pemenuhan sanitasi layak, air minum layak, akses listrik, rumah layak huni setiap tahun dalam APBD Kota Lhokseumawe.
- ❖ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam revitalisasi kawasan permukiman kumuh, dimana masyarakat dilibatkan pada setiap tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan, pengawasan dan pemeliharaan.

3.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; serta (iii) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang

dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, di antaranya melalui:

- a. bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Program Indonesia Pintar;
- b. bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, Top Up bansos reguler, dan Bantuan Beras;
- c. bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia);
- d. subsidi energi, seperti pemasangan listrik gratis, subsidi listrik dan subsidi elpiji; dan
- e. pemberian Bantuan Iuran Jaminan sosial Kesehatan Nasional (JKN).

2) Peningkatan pendapatan masyarakat

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya melalui:

- a. peningkatan Pendapatan/Akses Pekerjaan dan Penyediaan Infrastruktur Dasar, melalui program padat karya dan bantuan individu/kelompok, seperti Program Padat Karya Tunai/PKT (desa dan sektor);
- b. peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, melalui program vokasi dan pelatihan, seperti kartu prakerja, program vokasi;
- c. peningkatan Kapasitas UMKM, melalui peningkatan akses pasar, serta Pendampingan dan Penguatan kewirausahaan, seperti program pendampingan usaha; dan

- d. peningkatan Akses Pembiayaan UMKM, melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun nonbank, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

- a. pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak; dan
- b. peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

BAB IV

RENCANA AKSI TAHUNAN TAHUN 2024

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2024

Tema Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2024 adalah “***Peningkatan Kualitas SDM dalam Mensukseskan Agenda Politik Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak serta Mengoptimalkan Pertumbuhan Ekonomi***”. Tema tersebut diharapkan mampu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan daerah dan sasaran pembangunan daerah, mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah Aceh yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPK, serta isu strategis di tahun 2024, maka prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe untuk Tahun 2024 yaitu:

1. Reformasi Birokrasi
2. Pendidikan
3. Pertumbuhan Ekonomi
4. Kesehatan
5. Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya
6. Infrastruktur
7. Lingkungan Hidup

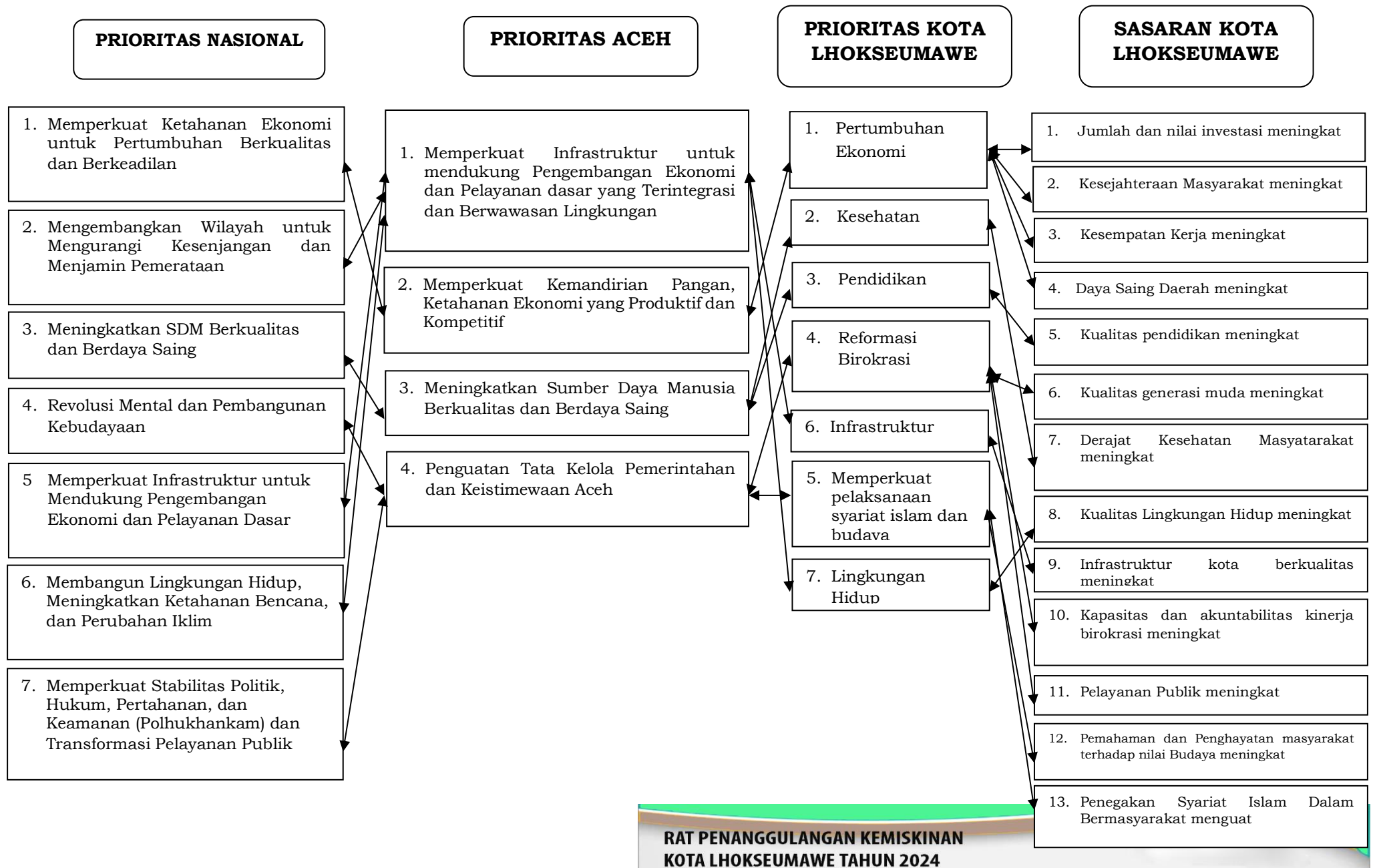
Adapun penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Lhokseumawe diarahkan dengan kebijakan yang telah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Aceh. Arah kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perhatian pada upaya untuk bangkitnya perekonomian yang diarahkan pada penurunan tingkat kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Selanjutnya sasaran daerah untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. jumlah dan nilai investasi meningkat
2. kesejahteraan Masyarakat meningkat
3. kesempatan Kerja meningkat
4. daya Saing Daerah meningkat
5. kualitas pendidikan meningkat
6. kualitas generasi muda meningkat
7. derajat Kesehatan Masyarakat meningkat
8. kualitas lingkungan hidup meningkat
9. infrastruktur kota berkualitas meningkat
10. kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi meningkat
11. pelayanan publik meningkat
12. pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap nilai budaya meningkat
13. penegakan syariat islam dalam bermasyarakat menguat

Secara lebih jelas pengelompokan sasaran pembangunan Kota Lhokseumawe berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1 Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Kota Lhokseumawe



Perumusan prioritas pembangunan daerah Kota Lhokseumawe yang akan dilaksanakan Tahun 2024, mempertimbangkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPK Tahun 2021, Target RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 untuk Tahun 2024, Prioritas Nasional Tahun 2024 dan Prioritas Aceh Tahun 2024. Prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 yang telah ditetapkan tersebut, dicapai melalui pelaksanaan program-program prioritas. Program prioritas merupakan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang *outcome* nya ditujukan untuk mewujudkan sasaran daerah.

Anggaran untuk program prioritas dimaksud dipenuhi secara optimal sebelum mengalokasikan anggaran untuk program non prioritas atau program yang sifatnya mendukung (*supporting*). Berikut ini adalah Prioritas Pembangunan, Sasaran serta Program Prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Program Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Prioritas	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur kota berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Prioritas	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prioritas	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya	Menguatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat	Program Pendidikan Dayah	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
	Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan masyarakat terhadap nilai Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Majelis Adat Aceh
		Program Majelis Adat Aceh (MAA)	Sekretariat Majelis Adat Aceh
	Menguatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
		Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Baitul Mal
		Program Baitul Mal	Sekretariat Baitul Mal

Prioritas	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
		Program Syariat Islam Aceh	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
Pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
		Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Prioritas	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Prioritas	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
		Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Prioritas	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pengarusutamaan Gender Dan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
		Pemberdayaan Perempuan	serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanahan
		Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pertanahan
		Program Pengurusan Hak Atas Tanah	Dinas Pertanahan
		Program Survei, Pengukuran Dan Pemetaan	Dinas Pertanahan

Prioritas	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
		Program Pengembangan Dan Pembinaan SDM Dan Kelembagaan Pertanahan	Dinas Pertanahan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	Dinas Pertanahan
		Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan	Dinas Pertanahan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
		Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Prioritas	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat DPRK
	Meningkatnya Pelayanan Publik	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRK
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Prioritas	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Meningkatnya Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
	Meningkatnya Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Banda Sakti
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Banda Sakti

Prioritas	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banda Sakti
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Banda Sakti
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Banda Sakti
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Blang Mangat
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan Blang Mangat
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Blang Mangat
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Blang Mangat
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Blang Mangat
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Blang Mangat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Muara Satu
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Muara Satu
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Muara Satu
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Muara Satu
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Muara Satu
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Kecamatan Muara Dua

Prioritas	Sasaran	Program	Perangkat Daerah
		Daerah Kabupaten/Kota	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan Muara Dua
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kecamatan Muara Dua
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Muara Dua
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Muara Dua
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: RPK Lhokseumawe 2023-2026

4.2. Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024

Rencana aksi tahunan (RAT) penanggulangan kemiskinan Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

Tabel 4.2 Matriks Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2024

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.03.03.2.01.0022	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	585,000,000	APBK	Muara Dua, Banda Sakti, Blang Mangat	10 unit/ 4 kecamatan
2	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.03.03.2.01.0028	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3,643,661,000	DAK	Muara Satu, Banda Sakti, Blang Mangat	5 kelompok/ gampong (Asan Kareung, Mesjid Meuraksa, Mesjid Punteut dan Ujong Blang
3	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.03.05.2.01.0041	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	25,000,000	APBK	Semua Kecamatan Kota Lhokseumawe	1 dokumen
4	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.04.05.2.01.0002	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2,801,143,684	APBK	Semua Kecamatan Kota Lhokseumawe	4 Kecamatan
5	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.04.03.2.03.0002	Program Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	606,268,104	APBK	Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu	26 Unit
6	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	2.13.05.2.01.0009	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	262,043,600	DAU	4 Kecamatan / 68 Gampong	4 Kecamatan

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
7	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	2.13.05.2.01.0002	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	25,000,000	DAU	4 Kecamatan / 68 Gampong	4 Kecamatan dan 68 Gampong
8	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	2.13.04.2.01.0013	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	10,000,000	DAU	4 Kecamatan / 68 Gampong	4 Kecamatan
9	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	2.13.04.2.01.0004	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	86,880,221	DAU	4 Kecamatan / 68 Gampong	4 Kecamatan
10	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	2.13.04.2.01.0003	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	25,000,000	DAU	4 Kecamatan / 68 Gampong	4 Kecamatan dan 68 Gampong
11	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	2.13.05.2.01.0005	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	10,000,000	DAU	4 Kecamatan / 68 Gampong	4 Kecamatan
12	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan	2.17.07.2.01.0002	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	50,000,000	DAU	4 Kecamatan	20 Unit Usaha

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
		Usaha Kecil dan Menengah							
13	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	2.07.03.2.01.0001	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	177,750,324	DAU Bidang Pendidikan dan DBH-CHT	Lhokseumawe	20 orang
14	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	2.09.03.2.01.0007	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30,000,000	DAU	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	1 Keluarga
15	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	2.09.03.2.04.0002	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	25,000,000	DAU	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	60 Orang
16	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	2.09.04.2.01.0001	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	9,999,810	DAU	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	4 Kecamatan
17	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	3.25.03.2.02.0002	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	20,000,000	DAU	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	7 Kelompok
18	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	3.25.04.2.02.0001	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	25,000,000	DAU	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	4 Kecamatan
19	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	3.25.03.2.02.0001	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	350,000,000	DAU	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	11 orang

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
20	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	3.25.04.2.04.0003	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9,997,245	DAU	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	4 Kecamatan
21	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	3.25.04.2.04.0006	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	350,000,000	DAU	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	2 kelompok
22	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	3.25.04.2.04.0002	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20,000,000	DAU	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	4 Kecamatan
23	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	3.25.06.2.01.0001	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000	DAU	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	4 Kecamatan
24	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	3.25.06.2.02.0001	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	20,000,000	DAU	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	20 Unit Usaha
25	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	3.27.02.2.01.0002	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	50,000,000	DAU	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	170 orang
26	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	3.27.07.2.01.0002	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	30,000,000	DAU	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	6 orang

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
27	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	3.27.05.2.01.0001	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	15,000,000	DAU	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	masyarakat
28	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	3.27.03.2.02.0002	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	700,000,000	DOKA	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	198 orang
29	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.03.0018	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2,756,640,000	DAK Non Fisik	4 Kecamatan	132 satuan pendidikan
30	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.04.0017	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	601,340,000	DAK Non Fisik	4 Kecamatan	3 satuan pendidikan
31	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.01.0029	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	17,820,600,000	DAU	4 Kecamatan	110 satuan pendidikan
32	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.02.0042	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	9,327,900,000	DAU	4 Kecamatan	25 satuan pendidikan
33	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.01.0047	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	6,352,894,600	DANA OTSUS dan DAU	4 Kecamatan	12 Ruang (9 satuan pendidikan)
34	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.01.0006	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	985,182,250	DAU	4 Kecamatan	5 unit (5 satuan pendidikan)
35	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.02.0012	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	300,000,000	DAU	4 Kecamatan	5 unit (5 satuan pendidikan)

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
36	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.01.0051	Program Pengelolaan Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SD)	1,675,986,000	DAU	4 Kecamatan	satuan pendidikan
37	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.02.0014	Program Pengelolaan Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (SMP)	1,456,397,000	DAU	4 Kecamatan	satuan pendidikan
38	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.01.0048	Program Pengelolaan Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	702,082,000	DAU	4 Kecamatan	satuan pendidikan
38	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02.2.02.0024	Program Pengelolaan Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	100,693,000	DAU	4 Kecamatan	satuan pendidikan
39	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.22.03.2.01.0001	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	521,900,000	DAU	4 Kecamatan	50 orang (sanggar Pocut Meurah Inseun)
40	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.04.2.02.0006	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	224,400,000	DAK Non Fisik	68 Gampong	4 Kecamatan
41	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	9.01.04.7.03.0003	Program Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	694,508,119	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua, Blang Mangat	118 orang

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
42	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	9.01.04.7.03.0001	Program Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	1,145,000,000	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua, Blang Mangat	1985 orang
43	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	9.01.04.7.03.0006	Program Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	60,000,000	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua, Blang Mangat	50 orang
44	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	9.01.04.7.03.0005	Program Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	12,500,000	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua, Blang Mangat	6 orang
45	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	9.01.04.7.03.0007	Program Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	1,120,000,000	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua, Blang Mangat	235 orang
46	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	9.01.04.7.03.0008	Program Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	1,470,151,931	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua, Blang Mangat	326 orang
47	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	9.01.04.7.03.0002	Program Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	2,520,000,000	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua, Blang Mangat	1349 orang
48	Mengurangi Beban Pengeluaran	Sekretariat Baitul Mal	9.01.04.7.03.0004	Program Baitul Mal	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	30,000,000	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua, Blang Mangat	15 orang
49	Mengurangi Beban Pengeluaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.01.0004	Program Penanggulangan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	114,997,335	DAU	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	50 Sekolah

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
50	Mengurangi Beban Pengeluaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.03.0003	Program Penanggulangan Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	40,000,000	DAU	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	4 Kecamatan
51	Mengurangi Beban Pengeluaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.03.2.03.0009	Program Penanggulangan Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50,000,000	DAU	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	100 Paket
52	Meningkatkan Pendapatan	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	1.01.07.7.01.0004	Program Pendidikan Dayah	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	50,000,000	DAU	Banda Sakti, Muara Dua, Muara Satu, Blang Magat	60 Peserta didik
64	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	1.06.04.2.01.0001	Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Permakanan	500,000,000	DANA OTSUS	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	100 orang
65	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	1.06.04.2.01.0002	Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Sandang	20,000,000	DAU	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	100 orang
53	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	1.06.04.2.01.0007	Program Rehabilitasi Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	30,000,000	DAU	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	72 orang
54	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	1.06.04.2.01.0006	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	50,000,000	DAU Bidang Kesehatan	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	10 orag anak

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
55	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	1.06.04.2.02.0008	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	30,000,000	DAU Bidang Kesehatan	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	13 orang
56	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	1.06.04.2.02.0013	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	35,000,000	DAU Bidang Kesehatan	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	4 kecamatan
57	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	1.06.04.2.01.0011	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	25,000,000	DAU	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	70 orang
58	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	1.06.04.2.02.0005	Program Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Alat Bantu	105,000,000	DAU	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	34 orang
59	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	1.06.05.2.02.0001	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	20,000,000	DAU	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	42 orang
60	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	1.06.05.2.02.0002	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	20,000,000	DAU	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	68 orang
61	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	1.06.02.2.03.0001	Program Perberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20,000,000	DAU	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	12 orang
62	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	1.06.02.2.03.0004	Program Perberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	25,000,000	DAU	Seluruh Desa/ Seluruh	5 lembaga

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
					Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	
63	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	1.06.02.2.03.0003	Program Perberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	110,000,000	DAU	Seluruh Desa/ Seluruh Kecamatan/ Kota Lhokseumawe	50 keluarga
66	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0025	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	420,574,226	DAK Non Fisik dan DBH-PR	Kec. Muara Satu, Muara Dua, B.Sakti, Blang Mangat	4 Kecamatan
67	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0026	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	13,346,617,843	APBN/APBD /Masyarakat yang mandiri bayar premi	Muara Dua , Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Satu	4 Kecamatan
68	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0004	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1,148,283,382	DOKA, DBH-PR, DAU Bidang Kesehatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan
69	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0003	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	121,220,000	DNF, DBH-PR, DAU Bidang Kesehatan, BOK Dinas	4 Kecamatan	4 Kecamatan
70	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0002	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	50,000,000	DBH-PR, DAU Bidang Kesehatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
71	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0001	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	128,205,000	DAU, DNF,DBH-PR, BOK Dinas	4 Kecamatan	4 Kecamatan
72	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0022	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	229,299,600	DAK Non Fisik dan DBH-PR	Kec. Muara Satu,Muara Dua, B.Sakti,Blang Mangat	4 Kecamatan
73	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0017	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	319,335,200	DAK NON FISIK	7 PUSKESMAS	4 Kecamatan
74	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0010	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	40,000,000	DAK Non Fisik dan DBH-PR	Kec. Muara Satu,Muara Dua, B.Sakti,Blang Mangat	4 Kecamatan
75	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0021	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	30,000,000	DAK Non Fisik dan DBH-PR	Kec. Muara Satu,Muara Dua, B.Sakti,Blang Mangat	4 Kecamatan
76	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0012	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	129,500,000	DAK Non Fisik dan DBH-PR	Kec. Muara Satu,Muara Dua, B.Sakti,Blang Mangat	4 Kecamatan
77	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0011	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	741,933,700	DAK Non Fisik dan DBH-PR	Kec. Muara Satu,Muara Dua,	4 Kecamatan

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
				Upaya Kesehatan Masyarakat				B.Sakti,Blang Mangat	
78	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0007	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	60,000,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan
79	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0005	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	40,000,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok- Pelayanan Kesehatan	4 Kecamatan	4 Kecamatan
80	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0006	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	10,000,000	DanaTransfer Umum- DanaAlokasi Umum	4 Kecamatan	4 Kecamatan
81	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0009	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	250,876,320	DAK Non Fisik dan DBH-PR	Kec. Muara Satu,Muara Dua, B.Sakti,Blang Mangat	4 Kecamatan
82	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	1.02.02.2.02.0008	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	40,000,000	DAK Non Fisik dan DBH-PR	Kec. Muara Satu,Muara Dua, B.Sakti,Blang Mangat	4 Kecamatan
83	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.0002	Program Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	40,000,000	DAU	4 Kecamatan	5 Layanan

No	Tujuan Program	Perangkat Daerah Pelaksana	Kode	Program	Subkegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pembiayaan	Lokasi (Kecamatan/ Kelurahan/ Desa)	Sasaran Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
84	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0004	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	15,000,000	DAU	4 Kecamatan	1 Laporan
85	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.02.0002	Program Pendaftaran Penduduk	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	85,000,000	DAU	4 Kecamatan	3 Dokumen
86	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.03.0008	Program Pendaftaran Penduduk	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	15,000,000	DAU	68 Desa	46800 Dokumen
87	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.04.2.03.0008	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	10,000,000	DAU	4 Kecamatan	12 Dokumen
TOTAL						78,381,761,494			

BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan tahun 2024 ini disusun berdasarkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Lhokseumawe tahun 2023-2026. Penyusunan RAT merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, diselaraskan atau dipadukan dengan Visi dan Misi kepala daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lhokseumawe tahun 2023-2026.

Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kota Lhokseumawe Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan Tahun 2024 dan diharapkan juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan, oleh karena itu Rencana Aksi Tahunan (RAT) perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan keuangan daerah. Pelaksanaan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan diharapkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah juga melibatkan dunia usaha/swasta, organisasi masyarakat, akademi, organisasi keagamaan, mitra pembangunan, dan media massa dan dalam melakukan pelaksanaan perlu mekanisme kerja.

Dengan adanya dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) diharapkan dapat menjadi pemicu percepatan penurunan tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe melalui pendekatan yang komprehensif dan terpadu serta pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana dan berkesinambungan.